BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020-2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang:

a. bahwa guna terwujudnya pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial dalam upaya mempercepat dan meningkatkan pemberdayaan desa melalui pembangunan partisipatif dengan pendekatan desa membangun dan pendekatan membangun desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, perlu menetapkan desa-desa (Gampong-gampong) dalam Kecamatan sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk perencanaan kawasan perdesaan yang mempedomani Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Utara terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak meyelengarakan urusan rumah tangga sendiri.
4. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
5. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan dalam hal pertanian, perkebunan, ketahanan pangan dan pariwisata termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

6. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan antar gampong yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat gampong, melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Tim Penyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Tim yang menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
8. Tim Koordinasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Tim yang Menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkat Kewenangannya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan asas :
a. partisipatif;
b. holistik dan komprehensif;
c. berkesinambungan;
d. keterpaduan;
e. keadilan;
f. keseimbangan;
g. transparan;
h. akuntabilitas.

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dipriotaskan pada tema pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat gampong melalui pendekatan partisipatif dengan mengintergrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak kawasan yang ditetapkan.

BAB III
RENTANG KENDALI

Pasal 4

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara.
(2) Dokumen Perencanaan dimaksud pada ayat (1), adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menegah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 5

Rentang kendali pembangunan kawasan meliputi 7 (tujuh) program prioritas, yaitu :
a. pemenuhan standar pelayanan minimum di gampong;
b. penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong;
c. pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan gampong-kota;

d. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan;
e. pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan tentang desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
f. penguatan pemerintahan gampong;
g. pembangunan sumber daya manusia, keberdayaan dan modal serta sosial budaya masyarakat gampong.

Pasal 6

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan dilaksanakan oleh Tim Penyusun dan Tim Koordinasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 7

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan, meliputi :
   - 1.1 Latar Belakang
   - 1.2 Dasar Hukum
   - 1.3 Ruang Lingkup
   - 1.4 Sistematika Penulisan

b. BAB II Isu-Isu Strategis dan Analisis Kawasan, meliputi :
   - 2.1 Isu-isu Strategis
     - 2.1.1 Kawasan Transmigrasi
     - 2.1.2 Kawasan Minapolitan
     - 2.1.3 Kawasan Agropolitan
     - 2.1.4 Kawasan Pariwisata
   - 2.2 Analisis Kawasan
     - 2.2.1 Kondisi Umum Daerah
     - 2.2.2 Kondisi Geografis Daerah
     - 2.2.3 Kawasan Transmigrasi
     - 2.2.4 Kawasan Minapolitan
     - 2.2.5 Kawasan Agropolitan
     - 2.2.6 Kawasan Pariwisata

c. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, meliputi :
   - 3.1 Tujuan
     - 3.1.1 Kawasan Transmigrasi
     - 3.1.2 Kawasan Minapolitan
     - 3.1.3 Kawasan Agropolitan
     - 3.1.4 Kawasan Pariwisata
   - 3.2 Sasaran
     - 3.2.1 Kawasan Transmigrasi
     - 3.2.2 Kawasan Minapolitan
     - 3.2.3 Kawasan Agropolitan
     - 3.2.4 Kawasan Pariwisata
   - 3.3 Strategi dan Kebijakan
     - 3.3.1 Kawasan Transmigrasi
     - 3.3.2 Kawasan Minapolitan
     - 3.3.3 Kawasan Agropolitan
     - 3.3.4 Kawasan Pariwisata

d. BAB IV Indikasi Program Dan Pendanaan
e. BAB V Penutup

Pasal 8

Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Aceh Utara dibebankan pada APBK Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Maret 2021 M
15 Syakban 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Maret 2021 M
15 Syakban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL 29 MARET 2021 M
15 SYAKBAN 1442 H

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020-2025

A. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan turunan lainnya, melalui diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka legalitas dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan semakin lengkap.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 83, menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Lebih lanjut disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; b) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Untuk

melaksanakan amanat ini, maka perlu disusun Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dibahas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang mendukung, usulan dari pemerintah desa, maupun rencana dan program pembangunan kabupaten/kota/desa di masa mendatang (RPJMDaerah dan RPJMDesa) dan RTRW Kabupaten/Kota. Proses tersebut merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan terhadap desa dan Kawasan Perdesaan.

Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa ataupun gampong yang dilakukan untuk mempercepat dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, karena tidak meratanya pembangunan antar daerah pada saat ini, masih menjadi tantangan terbesar dalam proses pembangunan. hal ini dapat terlihat dari angka-angka statistik pemerintah maupun non pemerintah yang menunjukkan bahwa, dari aspek ekonomi (pertumbuhan), aspek sosial (kemiskinan), infrastruktur (sarana dan prasarana), merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa masih terjadinya kesenjangan pembangunan, baik antar wilayah antar provinsi, Kabupaten/Kota, dana antar desa. kesenjangan antara kawasan telah banyak melahirkan kemiskinan ini fakta yang terjadi baik antar Wilayah,antar Provinsi,Kabupaten/Kota maupun Desa. diberlakukan Undang-undang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. Tujuan dari lahirnya undang-undang desa antara lain adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat di perdesaan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
14. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor 59 Tahun 2020 tentang Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi (P2RKT);
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032;
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025;
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.

1.3. Ruang Lingkup

Penyusunan dokumen Rencana Kawasan Pembangunan Perdesaan (RPKP) dalam melakukan kebijakan dan program yang dijabarkan dalam dokumen diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan terpadu kawasan perdesaan Kabupaten Aceh Utara.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan kegiatan Rencana Pembangunan kawasan Perdesaan (RPKP) untuk pengembangan Kawasan Perdesaan strategis yang terpadu antar sektor,antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek(1 tahun) dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan perdesaan yang mandiri, maju, berdaya saing dan berkelanjutan.

Metode kerja secara partisipatif dan juga melibatkan stakecholder terkait, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Aceh Utara memilih empat kawasan yaitu kawasan Transmigrasi, kawasan Minapolitan, kawasan Agropolitan dan kawasan Pariwisata. Dimana keempat kawasan tersebut saling berkaitan dalam memajukan

produk unggulan masing-masing kawasan dalam Kabupaten Aceh Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPKP Kabupaten Aceh Utara disusun sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, ruang lingkup penulisan;

b. BAB II Isu-Isu Strategis dan Analisis Kawasan yang memuat isu-isu strategis kawasan transmigrasi, kawasan minapolitan, kawasan agropolitan dan kawasan pariwisata, serta analisis kawasan;

c. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, memuat tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan;

d. BAB IV Indikasi Program dan Pendanaan, berisi tentang program dan kegiatan serta pendanaan.

e. BAB V Penutup, merupakan penutup dari keseluruhan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

B.BAB II ISU-ISU STRATEGIS DAN ANALISIS KAWASAN

2.1 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan mendatang. Analisis Isu-isu strategis diperlukan untuk memberi arahan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Analisis isu-isu strategis ini diperoleh dari analisis potensi, masalah kawasan perdesaaan dan dikaitkan dengan analisis dokumen-dokumen perencanaan.

Potensi adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh kawasan perdesaan yang memiliki nilai guna untuk dapat dimanfaatkan atau dibudidayakan sehingga dapat memberikan manfaat dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Potensi dinilai dari aspek fisik dasar, sosial budaya, ekonomi, serta sarana dan prasarana. Masalah adalah segala tantangan yang dimiliki oleh kawasan perdesaan yang dapat menjadi kendala dalam kegiatan pemanfaatan atau budidaya sumber daya kawasan yang ada sehingga menghambat penambahan nilai guna sumberdaya

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025, beberapa permasalahan yang menjadi isu-isu strategis jangka panjang Kabupaten Aceh Utara terkait pengembangan kawasan perdesaan antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan masih tinggi dan kreativitas Sumber Daya Manusia masyarakat rendah;
2. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal;
3. Belum berkembangnya sektor koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
4. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi;
5. Ketahanan pangan belum mantap dan nilai tambah produk pertanian masih rendah;

6. Pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur perhubungan serta parawisata belum memadai;
7. Kualitas lingkungan dan penanganan resiko bencana masih rendah.

Lebih lanjut, pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara periodik melalui pentahapan dalam rencana jangka menengah. Rencana pembangunan Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2022 merupakan bagian integral dari lingkungan strategis secara regional. Oleh karena itu perlu disusun strategi pengembangan wilayah yang dapat menciptakan sinergi antar wilayah, antar sektor dan antar pelaku, sehingga dapat memberikan hasil-hasil yang efektif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungannya.

Berdasarkan hasil survey lapangan dan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, ditemukan beberapa potensi, permasalahan dan usulan rencana program dari Gampong yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tema pengembangan kawasan.

Adapun isu strategis dalam RPJM Kabupaten Aceh Utara yang mendukung Rencana Pembangunan Kawasan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Kawasan Transmigrasi

Isu Strategis pada kawasan Transmigrasi sesuai potensi dapat dilihat sebagaimana data tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Potensi dan Permasalahan Kawasan Perdesaan Transmigrasi
Kabupaten Aceh Utara

Aspek	Potensi	Masalah
Fisik Dasar	- Luas lahan Perkebunan dan Pertanian - Sawit, Karet, Kakao, Ubi, Jagung dan kacang tanah	- Bagian Wilayah Tengah dan berbukit
Sosial Budaya	- Pendidikan, Kesehatan, Dayah	- Sarana dan prasarana dan distri busi tenaga pendidik dan kesehatan serta dayah sangat terbatas
Ekonomi	- Mata pencaharian	- Produksi dan

	berkebun dan bertani	produktivitas serta nilai tambah petani masih rendah
Sarana dan Prasarana	- Existing Sarana dan Prasarana telah ada	- sarana dan prasarana lingkungan permukiman dalam kondisi rusak

Analisa isu strategis pada kawasan transmigrasi yang selama ini masih menjadi tantangan dalam pengembangan kawasan transmigrasi adalah :

1. Aksesibilitas poros dan penghubung jalan dan jembatan dam kondisi rusak.
2. Minimnya sarana transportasi yang melintasi kawasan transmigrasi.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta produktivitas dan nilai tambah petani masih rendah.
4. Fasilitas infrastruktur sosial masyarakat seperti sekolah, puskesmas, dayah, balai pengajian dan lainnya belum tertata dan bersih.
5. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan permukiman seperti Air bersih dan sanitasi, juga drainase belum tersedia dengan baik.

2.1.2. Kawasan Minapolitan

Isu Strategis pada kawasan Minapolitan sesuai potensi dapat dilihat sebagaimana data tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Potensi dan Permasalahan Kawasan Perdesaan Minapolitan
Kabupaten Aceh Utara

Aspek	Potensi	Masalah
Fisik Dasar	- Luas lahan perikanan budi daya (tambak) - Panjang garis pantai	- Wilayah pesisir dipengaruhi oleh pasang surut air laut, rentan terhadap abrasi - Sedimentasi menyebabkan muara menjadi dangkal
Sosial Budaya	- Tingkat Pendidikan masyarakat di kawasan perdesaan minapolitan cukup baik, pendidikan anak-anak nelayan dan petani sampai ke jenjang S1	- SDM untuk perikanan budidaya masih kurang - Masih rendahnya kapasitas SDM dalam melakukan inovasi pengeolahan hasil perikanan.

Aspek	Potensi	Masalah
Ekonomi	- Sebagian besar penduduk di kawasan perdesaan minapolitan bekerja pada sektor perikanan	- Produksi berfluktuasi, saat terjadi kelebihan produksi, harga turun
Sarana dan Prasarana	- Tersedianya jalan akses, TPI, armada dan alat tangkap	- Kondisi muara dangkal - Jalan akses ke pinggir pantai kurang memadai - Sarana penyimpanan hasil produksi perikanan tangkap (cold storage, box storage) masih kurang - Jalan dan jembatan produksi di area tambak masih kurang baik.

2.1.3. Kawasan Agropolitan

Isu Strategis pada kawasan Agropolitan sesuai potensi dapat dilihat sebagaimana data tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Potensi dan Permasalahan Kawasan Perdesaan Agropolitan
Kabupaten Aceh Utara

Aspek	Potensi	Masalah
Fisik Dasar	- Lahan Pertanian, Lahan Perkebunan dan padang pengembalaan	- Indeks penanaman padi belum maksimal. - Produksi dan produktivitas tidak kontinyue. - Pengembangan peternakan masih konvensional
Sosial Budaya	- Mayoritas penduduk pencahariannya pertanian	- Masih tinggginya tingkat kemiskinan - Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
Ekonomi	- Produksi pertanian masih dalam bentuk bahan baku/mentah	- Produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan masih rendah
Sarana dan Prasarana	- Tersedianya jalan usaha tani dan saluran irigasi	- Belum memadai jalan usaha tani dan saluran irigasi dalam kondisi rusak

2.1.4. Kawasan Pariwisata

Isu Strategis pada kawasan Pariwisata sesuai potensi dapat dilihat sebagaimana data tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Potensi dan Permasalahan Kawasan Perdesaan Pariwisata
Kabupaten Aceh Utara

Aspek	Potensi	Masalah
Fisik Dasar	- Banyaknya objek wisata sejarah, alam dan religius	- Belum ada aksesibilitas terutama sarana dan prasarana pendukung menuju ke objek wisata serta produk pariwisata kurang dikenal wisatawan
Sosial Budaya	- Pendidikan	- Terbatasnya sarana dan prasarana objek wisata serta lemahnya promosi situs-situs sejarah pariwisata yang mempunyai nilai-nilai budaya keacehan yang Islami, sehingga kurang dikenal oleh para wisatawan lokal, nasional maupun internasional. Pariwisata Islami (Kerajaan Samudera Pasee) sulit dimanfaatkan secara maksimal.
Ekonomi	- Kemitraan dan pelaku pariwisata	- Perilaku Pemangku kepentingan pariwisata belum koordinatif. Objek wisata belum dikelola secara profesional
Sarana dan Prasarana	- Infrastruktur	- Belum ada aksesibilitas terutama sarana dan prasarana pendukung menuju destinasi wisata - Terbatasnya sarana dan prasarana objek wisata serta minimnya promosi situs-situs sejarah pariwisata yang mempunyai nilai-nilai budaya keacehan yang islami, sehingga kurang dikenal oleh para wisatawan lokal, nasional maupun internasional. - Pariwisata Islami (Kerajaan Samudera Pasee) belum dimanfaatkan secara maksimal - Perilaku Pemangku kepentingan pariwisata belum koordinatif. - Objek wisata belum dikelola secara professional

2.2 Analisis Kawasan

2.2.1 Kondisi Umum Daerah

Kondisi umum daerah kabupaten Aceh Utara meliputi:

1. Aspek Geografis dan demografi yang menjelaskan tentang kondisi geografis antara lain gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah serta potensi pengembangan wilayah. Sedangkan kondisi demografi menjelaskan tentang perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga.
3. Aspek Pelayanan Umum menjelaskan tentang aspek palayanan umum yang merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis. Uraian akan difokuskan pada urusan layanan wajib dan urusan layanan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintah.
4. Aspek Daya Saing Daerah diuraikan sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan, yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar, disertai penjelasan dan analisis. Pada aspek daya saing daerah akan menjelaskan tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.2.2 Kondisi Geografi Daerah

2.2.2.1 Aspek Geografis

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota yang terletak pada bagian utara Provinsi Aceh, berdasarkan peta Bakosurtanal Kabupaten aceh Utara secara geografis terletak pada posisi 96^0 47' – 97^0 31' Bujur Timur dan 04^0 43' – 05^0 16' Lintang Utara. Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain Pembentukan Kabupaten Bireun dan

Pembentukan Kota Lhokseumawe, wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini berbatasan:

- Sebelah utara : Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka.
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur.
- Sebelah selatan: Kabupaten Bener Meriah.
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen.

Gambaran tematik batas wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana Gambar berikut :

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara

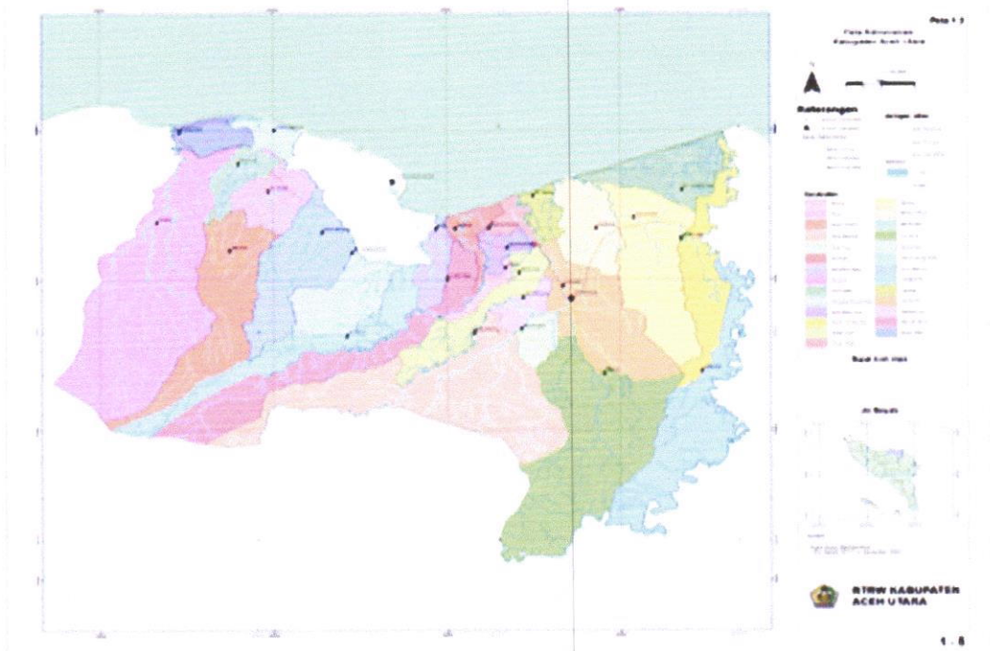

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Tabel 2.5
Statistik Geografi Kabupaten Aceh Utara

Uraian	Satuan	2019
Luas	Km^2	3.296,86
Desa di Pesisir	Desa	40
Desa Bukan Pesisir	Desa	812
Desa di Lembah	Desa	30
Desa di Lereng	Desa	58
Desa di Dataran	Desa	728

Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2019

Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 3.296,86 km^2, atau 329.686 Ha, yang terdiri dari 27 kecamatan 76 kemukiman 852 gampong. Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Paya Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km^2 atau 12,69 persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. masing-masing kecamatan dibagi dalam 1 sampai 4 kemukiman. Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak terdapat di Kecamatan Lhoksukon yang memiliki 75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yaitu sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan nisam. Luas wilayah, jumlah kemukiman dan jumlah gampong menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Luas Wilayah Kemukiman dan Jumlah gampong
menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Sawang	384,65	11,67	2	39
2.	Nisam	193,47	5,87	3	29
3.	Nisam Antara	30,00	0,91	1	6
4.	Banda Baro	18,00	0,55	1	9
5.	Kuta Makmur	151,32	4,59	3	39
6.	Simpang Kramat	79,78	2,42	2	16
7.	Syamtalira Bayu	75,36	2,29	4	38
8.	Geureudong Pase	271,45	8,23	1	11
9.	Meurah Mulia	202,57	6,14	3	50
10.	Matangkuli	78,65	2,39	4	49
11.	Paya Bakong	418,32	12,69	4	39
12.	Pirak Timu	45,99	1,39	2	23

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
13.	Cot Girek	189,00	5,73	3	24
14.	Tanah Jambo Aye	162,98	4,94	4	47
15.	Langkahan	150,52	4,57	3	23
16.	Seunuddon	100,63	3,05	3	33
17.	Baktiya	158,67	4,81	3	57
18.	Baktiya Barat	83,08	2,52	3	26
19.	Lhoksukon	243,00	7,37	4	75
20.	Tanah Luas	30,64	0,93	3	57
21.	Nibong	44,91	1,36	2	20
22.	Samudera	43,28	1,31	3	40
23.	Syamtalira Aron	28,13	0,85	4	34
24.	Tanah Pasir	20,29	0,62	1	18
25.	Lapang	19,36	0,59	1	11
26.	Muara Batu	33,34	1,01	2	24
27.	Dewantara	39,47	1,20	2	15
TOTAL		3.296,86	100,00	71	852

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara Tahun 2019

a. Topografi dan Morfologi Wilayah

Topografi merupakan deskripsi bentuk dan karakteristik permukaan. Topografi suatu daerah dapat juga berarti bentuk dan karakteristik permukaan itu sendiri. Kabupaten Aceh Utara sebelah utara merupakan laut, yaitu Selat Malaka dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan. Sedangkan umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan secara umum adalah :

- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
- Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
- Zona vulkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggungan pegunungan.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 (BAKOSURTANAL), yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian Aceh Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian (Gambar 2.2) yaitu :

- 0 – 25 m dpl : 146.096 Ha, atau 44,31 %;
- 25 – 100 m dpl : 63.781 Ha, atau 19,35 %;
- 100 – 500 m dpl : 88.526 Ha, atau 26,85 %;
- 500 – 1000 m dpl : 20.932 Ha, atau 6,35 %;
- Di atas 1000 m dpl : 10.351 Ha, atau 3,14%

Gambar 2.2
Profil Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Utara

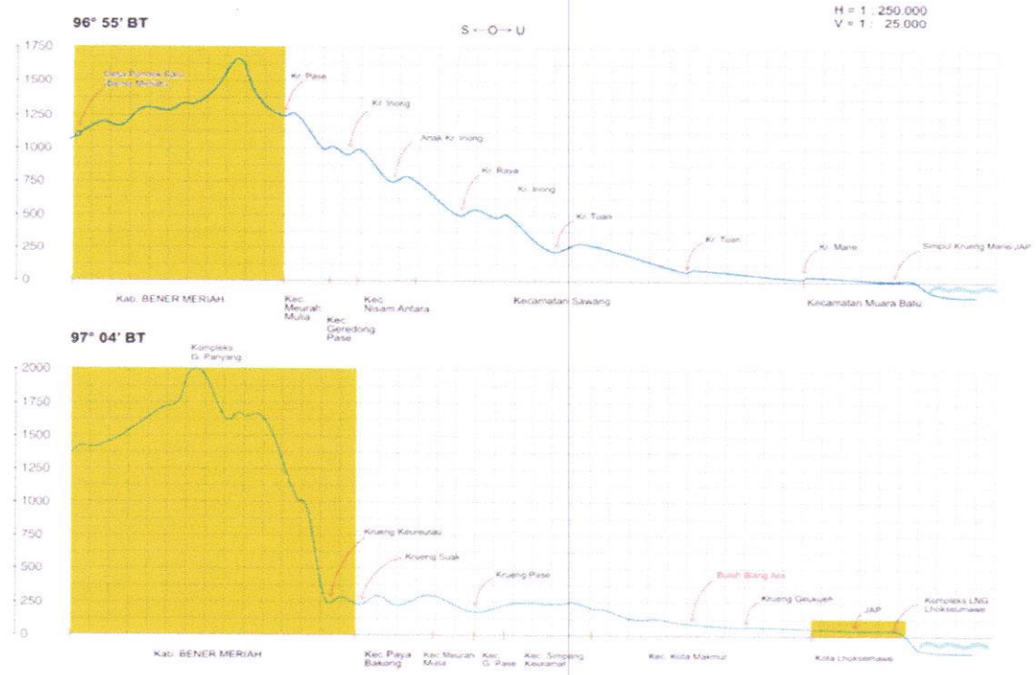

GAMBAR LANJUTAN

PROFIL WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA

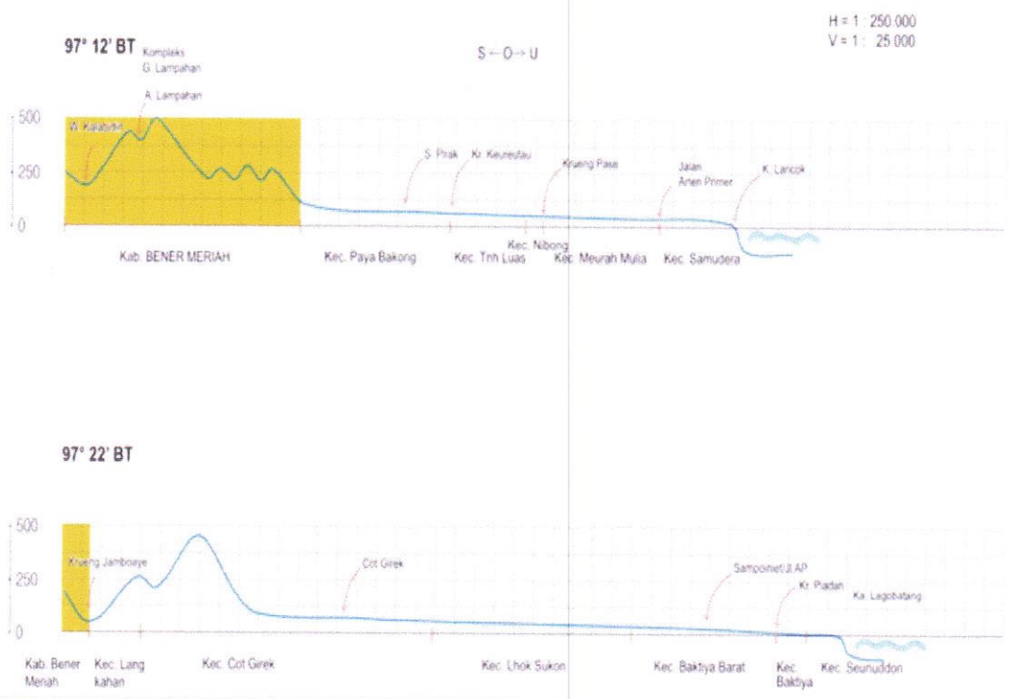

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Utara

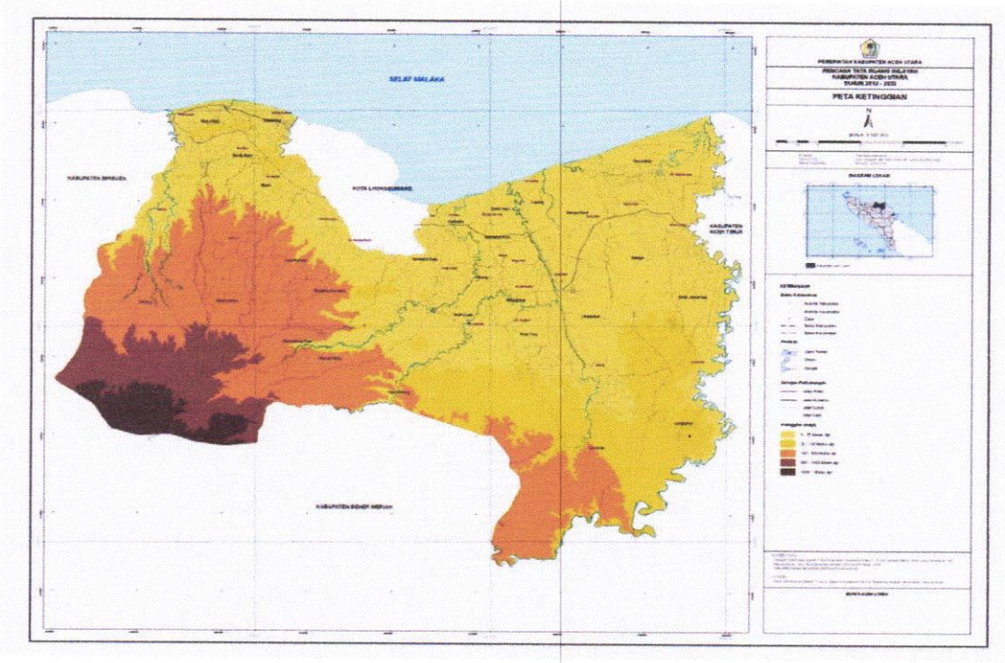

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Aceh Utara (Gambar 2.4) yaitu :

- 0 – 2 % : 50,38 %, atau sekitar166.063 Ha;
- 2 – 8 % : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
- 8 – 15 % : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
- 15 – 25 % : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
- 25 – 40 % : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
- > 40 % : 3,39 %, atau sekitar 11.176 Ha.

Gambar 2.4
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara

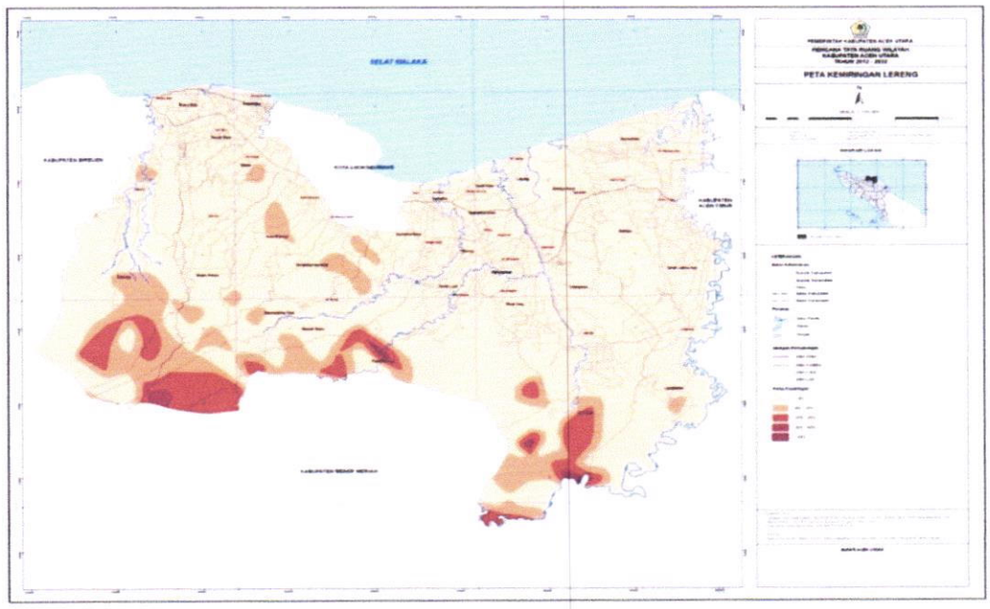

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

b. Iklim

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1.000–2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 30^0 C, dengan kisaran antara 21^0 C sampai 35^0C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28^0 C, dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah $32,8^0$ C. Kelembaban udara berkisar antara 84–89 persen dengan rata-rata 86,6 persen. Lebih jelasnya sebagaimana tercantum pada gambar 2.5 berikut :

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara

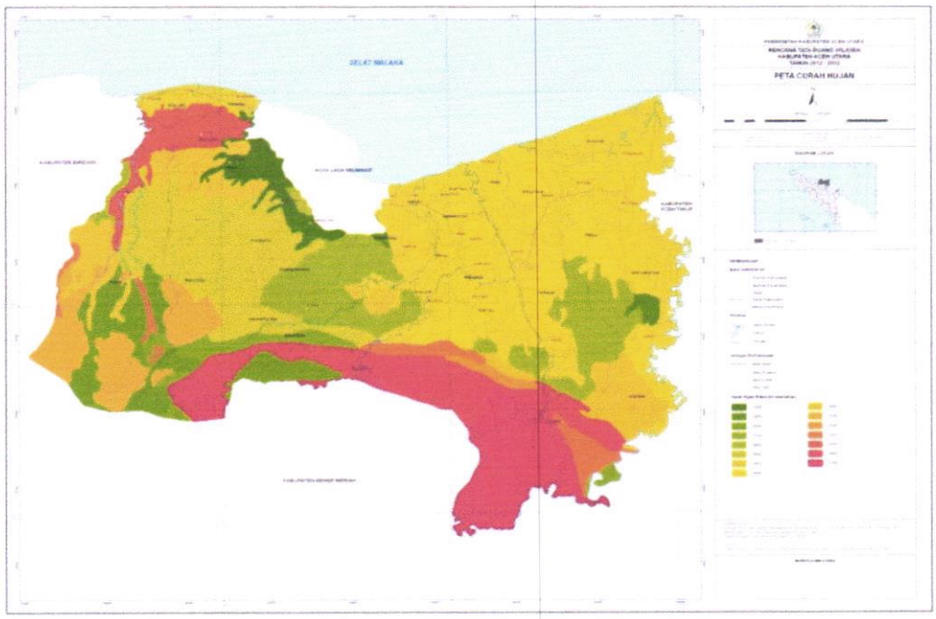

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

c. Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah

Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan. Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah/lahan di Kabupaten Aceh Utara. Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu dominan kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan di pedalaman. Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari yang terdalam (>90 cm) sampai yang terdangkal (<30 cm) adalah mengikuti pola dari pesisir ke pedalaman. Jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut:

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara

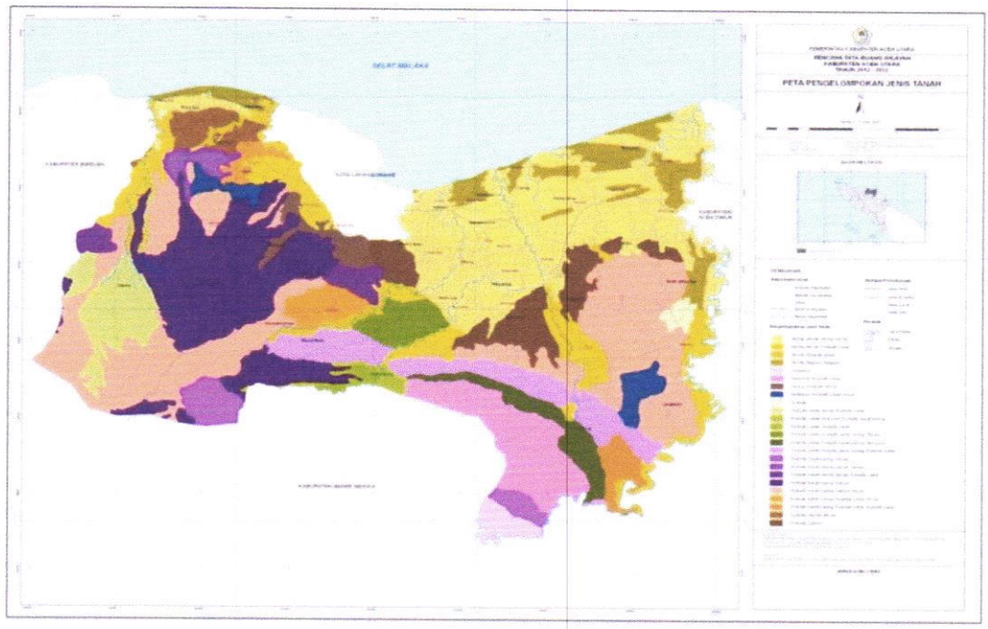

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

d. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara) dan batuan tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan, dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS, dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut :

Gambar 2.7.
Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara

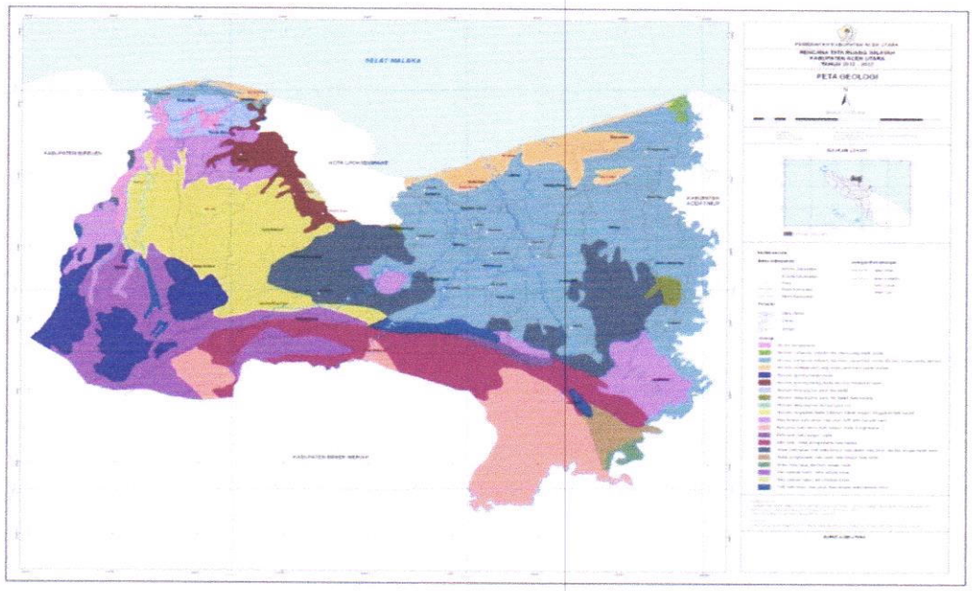

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

2.2.3 Kawasan Transmigrasi

2.2.3.1 Fisik Dasar

Geografis 3 Kecamatan yang menjadi lokus dalam kajian ini yaitu Kecamatan Cot Girek dengan luas kecamatan 189 Km2 atau 18.900 Ha, terdiri dari 3 (tiga) kemukiman dan 24 (dua puluh empat) deesa/gampong. Luas kecamatan lhoksukon dan baktiya masing – masing 243 Km2 dan 158,67 Km yang terdiri dari beberapa pemukiman dengan batas wilayah kecamatan sebagaimana berikut :

Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek:

- Utara : Kec Lhoksukon
- Timur : Kec Langkahan
- Selatan : Kab. Bener Meriah
- Barat : Kec Pirak Timui

Desa Buket Hagu Kecamatan Buket Hagu:

- Utara : Kec Kec Lapang
- Timur : Kec Baktiya Barat
- Selatan : Kec Cot Girek, Pirak Timu
- Barat : Kec Kec Tanah Luas, Matangkuli

Desa Cinta Makmur dan Babussalam Kecamatan Baktiya

- Utara : Kec Seunuddon
- Timur : Kec Baktiya Barat
- Selatan : Kec Lhoksukon & langkahan
- Barat : Kec Baktiya Barat

Tabel 2.7
Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Batas Wilayah

No	Nama Kecamatan/Desa	Luas	Banyak mukim	Jumlah Desa
1	Cot Girek - Desa Alue Leuhob	189 Km2	3	24
2	Lhoksukon - Desa Buket Hagu	243 Km2	4	75
3	Baktiya - Desa Cinta Makmur - Desa Babus Salam	158,67 Km2	3	57

Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2019(diolah)

Secara umum ke empat desa yang menjadi lokus kajian ini merupakan desa-desa yang berada pada sepanjang sumbu wilayah (*regional axiz*) berupa Jalan Negara (Jalan Arteri Primer) yang berpola koridor Perkembangan (*development*

corridor), dengan karakter perkembangan berciri menarik atau *upward tradisional area*, dengan perkembangan yang cenderung terus tumbuh baik secara sosial-ekonomi maupun secara spesial (fisik keruangan).

a. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Kawasan transmigrasi yang menjadi lokus saat ini sekitar 5.153 Ha dengan rincian penggunan 39 ha lahan persawahan dan 5114 ha bukan lahan persawahan, berikut rincian luas desa dan Penggunaan Lahan.

Tabel 2.8
Luas Wilayah dan Batas Wilayah

NO	Desa/ Gampong	Luas Wilayah (Km2)	Persentase luas terhadap Kecamatan	Persentase luas terhadap luas Kabupaten	Tinggi daerah
1	Alue Leuhob	1.322	0,0699	0,0040	151
2	Buket Hagu	2.186	0,089	0,0066	120
3	Cinta Makmur	522	0,033	0,0015	96
4	Babussalam	1.123	0,070	0,0034	109

Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2019(diolah)

b. Waktu Tempuh

Desa Alue Leuhob memiliki jarak terdekat terhadap pusat pemerintahan, jarak tempuh desa Alue Leuhob terhadap ibu kota kantor kecamatan ialah 6,5 Km atau sekitar 20 menit sedangkan jarak desa Babussalam dengan ibu kota kecamatan paling jauh dengan jarak tempuh sekitar 20 Km dan 70 Km terhadap pusat Ibu kota Kabupaten.

Tabel 2.9
Waktu Tempuh

No	Kecamatan	Desa	Waktu Tempuh	
			Kantor Camat	Kantor Bupati
1	Cot Girek	Alue Leuhob	6,5 Km (20 Menit)	50,5 Km (120 Menit)
2	Lhoksukon	Buket Hagu	15,2 Km (30 Menit)	45,8 Km (100 Menit)
3	Baktiya	Cinta Makmur	15 Km (30 Menit)	65 Km (135 Menit)
4		Babussalam	20 Km (35 Menit)	70 Km (150 Menit)

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

c. Topografi dan Curah Hujan

Wilayah kawasan transmigrasi di ketiga kecamatan Cot Girek, Lhoksukon dan Baktiya terhimpun dalam satu kawasan yang berdekatan sehingga memiliki morfologi geografis yang sama berelief perbukitan dan pegunungan dengan tinggi daerah 96 mdpl hingga 150 mdpl diatas permukaan laut, rata-rata curah hujan pada tahun 2019 sebesar7 mm/hh dengan rata—rata jumlah hari hujan perbulan 16,5 hari/bulan, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Nopember sebesar 128 mm dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember 24 hari.

Tabel 2.10
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Malikussaleh, 2019

Bulan	Curah hujan	Jumlah hari hujan	Penyinaran matahari
Januari	26.0	12	68
Februari	42,2	9	79
Maret	41	9	86
April	47	9	69
Mai	119	18	64
Juni	80,0	13	58
Juli	62	11	70
Agustus	88.0	14	74
September	108.0	13	45
Oktober	120.0	23	43
Nopember	109.0	24	50
Desember	128.0	18	50

Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2019 (diolah)

d. Penggunaan Lahan

Kawasan transmigrasi di Kecamatan Cot Girek, Lhoksukon dan Baktiya memiliki dominasi penggunaan lahan berupa perkebunan dan perumahan, hanya sebagian kecil yang dapat dimanfaatkan sebagi arel pertanian dan rawa, perkebunan terdiri dari kebun sawit dan karet dengan total lahan seluas 4.368 ha. Adapun persawahan terdiri dari sawah tadah hujan yang banyak terdapat di desa babussalam dan cinta makmur dengan total pengguna lahan persawahan 39 ha.

Table 2.11
Penggunaan lahan tahun 2019 menurut desa di kawasan Transmigrasi

Desa/ Gampong	Luas Desa (Ha)	Penggunaan Lahan				
		Pemukiman	Persawahan	Perkebunan	Perkuburan	Rawa dan Hutan
Alue Leuhob	1.639	200	0	1430	2	7
Buket Hagu	2.236	431,5	0	1800	3,5	1
Cinta Makmur	799,4	204,9	0	440	3	150,5
Babussalam	899,5	110,5	0	688	1	100

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019 (diolah)

e. Kebencanaan

Kawasan perdesaan transmigrasi kabupaten Aceh Utara merupakan wilayah pegunungan dan dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan perubahan lingkungan oleh perbuatan manusia rentan terhadap tanah longsor terutama terjadi di gampong Bukit hagu sehingga sering kawasan ini terisolir jalur lalu lintas yang terputus.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melakukan langkah konkrit berupa perkerasan jalan dan pembuatan jembatan dan beronjong serta mengaspal sebahagian jalan seperti yang telah dilakukan di gampong Alue leuhob dan sedikit di gampong bukit hagu.

2.2.3.2 Sosial Budaya dan Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan komponen dalam suatu system wilayah yang dimiliki peran penting sebagai subyek atau pelaku pembangunan dan perubahan pemanfaatan ruang melalui berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.Selain sebagai pelaku perubahan pemanfatan ruang penduduk juga memiliki peran penting sebagai obyek sekaligus subyek dalam dinamika perkembangan wilayah.Hal yang berperan dalam kependudukan ialah kepadatan penduduk di suatu wilayah, laju pertumbuhan penduduk serta struktur penduduk.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, KK, rata-rata Penduduk di kawasan perdesaan transmigrasi

Desa/ Gampong	Laki-Laki	Perempuan	Jlh KK	Rata2 Penduduk	Jumlah
Alue Leuhob	720	743	451	3	1.463
Buket Hagu	1611	1634	729	4	3.245
Cinta Makmur	368	330	144	5	698
Babussalam	720	733	408	4	1.453

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019 (diolah)

b. Pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk Kawasan Perdesaan Transmigrasi tersebar tidak merata, desa cinta makmur jumlah penduduk paling sedikit yang hanya 698 jiwa dan menurun pada tahun 2019 menjadi 621 jiwa, sementara desa Babussalam dengan populasi terbanyak mencapai 2759 jiwa pada tahun 2019.

Tabel 2.13
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Desa Tahun 2015-2019 Kawasan Perdesaan Transmigrasi

No	Desa/ Gampong	2015	2016	2017	2018	2019
1	Alue Leuhob	1.387	1.410	1423	1.463	1.516
2	Buket Hagu	3050	3105	3144	3.245	2.058
3	Cinta Makmur	662	673	683	698	621
4	Babussalam	1.410	1.423	1.440	1.453	2.759

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019 (diolah)

c. Komposisi penduduk

Penduduk di kawasan perdesaan transmigrasi di kecamatan Cot Girek, Lhoksukon dan Baktiya berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penduduk perempuan dengan jumlah 3.440 jiwa, cinta makmur merupakan desa yang ratio terendah dan buket hagu merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk tertinggi.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, KK, rata-rata Penduduk di kawasan perdesaan transmigrasi

Desa/ Gampong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Alue Leuhob	720	743	1.463
Buket Hagu	1611	1634	3.245
Cinta Makmur	368	330	698
Babussalam	720	733	1.453
Jumlah	3.419	3.440	6.859

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019 (diolah)

d. Sosial Budaya Penduduk

Sebagai subyek pembangunan, potensi sumber daya manusia digunakan sebagai ujung tombak untuk mempercepat peningkatan kea rah kehidupan yang lebih baik. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia semakin cepat pula proses peningkatan kesejahteraan. Pembangunan dengan tujuan fisik tanpa diiringi dengan mempersiapkan perangkat pendukung seperti masyarakat hanya akan menimbulkan kesenjangan wilayah.Potensi sumber daya manusia dapat dilihat melalui jenjang pendidikan penduduk Tahun 2019.

Tabel 2.15
Tingkat Pendidikan Penduduk Menurut level jenjang sekolah kawasan perdesaan transmigrasi

Desa/ Gampong	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1/D4	S2	S3
Alue Leuhob	121	94	85	6	27	41	0	0
Buket Hagu	163	117	161	33	13	57	4	0
Cinta Makmur								
Babussalam	268	83	49	-	-	32	-	-

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

Selainnya dilihat dari mayoritas tingkat pendidikan masyarakat dapat juga dilihat dari tingkat pendidikan pemimpin masyarakat tersebut, berikut tingkatan pendidikan kepala desa dan sekretaris desa di masing-masing desa rata-rata SMA.

Sumber daya manusia juga dapat dilhat dari ketersediaan sarana pendidikan yang merupakan penunjang utama bagi peningkatan menuju perbaikan sumber daya manusia penduduk perdesaan transmigrasi, desa bukit hagu menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan hingga SMA,

sedangkan desa cintamakmur hanya memiliki satu sarana pada level sekolah dasar.

Kesehatan penduduk juga dapat menggambarkan kualitas sumber daya masyarakat setempat, alue leuhob terdapat 2 jiwa gizi buruk dan stunting terbanyak berada di desa buket hagu dengan jumlah 9 jiwa.

Tabel 2.16
Jumlah Gizi Buruk dan Stanting
Kawasan Perdesaan Transmigrasi

Desa	Jumlah Gizi Buruk dan Gizi Kurang		Jumlah Stunting
Alue Leuhob	0	2	4
Buket Hagu	0	1	9
Cinta Makmur	0	0	0
Babussalam	0	0	0

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

e. Ekonomi

Pembentukan kawasan perdesaan transmigrasi tentu tidak lepas dari beberapa kontribusi dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan dan industry lainnya walaupun dominasi tertinggi masih pada sektor pertanian dan perkebunan, namun demikian tidak bisa dinafikkan bahwa ada sektor ril lainnya yang dan insfrastuktur sarana perekonomian sebagai penunjang terbentuknya kawasan perdesaan ini. Berikut ketersediaan sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan perdesaan transmigrasi.

Tabel 2.17
Jumlah Rumah Tangga Pertanian Menurut Sub Sektor Tahun 2018

Desa/ Gampong	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan	Kehutanan
Alue Leuhob	77	201	-	-
Buket Hagu	38	239	-	-
Cinta Makmur	59	50	-	-
Babussalam	44	237	-	-

Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

f. Sarana dan Prasarana

1) Sarana Pendidikan

Kerersediaan sarana pendidikan formal atau sekolah umum dari tingkatan TK sampai dengan Perguruan Tinggi sangat

dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas suber daya Manusia, oleh karena itu ketersediaan sarana pendidikan merupakan hal penting bagi peningkatan kualitas pembangunan kawasan. Berdasarkan tebel keberadaan fasilitas pendidikan dapat ditemui di masing-masing kecamatan, Semakin banyak sarana pendidikan/ sekolah di Kabupaten Aceh Utara maka semakin mudah masyarakat mengakses ilmu pengetahuan, banyaknya jumlah peserta didik membuktikan bahwa tingginya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pendidikan. Sarana pendidikan Sekolah Dasar lurah kita temui disetiap desa hingga sekolah ini mendominasi bangunan terbanyak di kawasan Perdesaan Transmigrasi, sementara Perguruan Tinggi belum ada.

Gambar 2.8

SD Negeri 18 Baktiya Desa Cinta Makmur



Sumber : Survei Lapangan Tahun 2020

Tabel 2.18

Jumlah ketersediaan dan Akses Sekolah

Kecamatan	Desa/ Gampong	Akses Sekolah				
		SD	SMP	SMA	SMK	PT
Cot Girek	Alue Leuhob	1	1	-	-	-
Lhoksukon	Buket Hagu	2	1	1	-	-
Baktiya	Cinta Makmur	1	-	-	-	-
	Babussalam	1	1	-	-	-

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

2) Sarana kesehatan

Kesehatan merupakan hal penting pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, tingkat kesehatan yang tinggi akan mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat juga tinggi, tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi juga didukung oleh sarana kesehatan yang mencukupi, jika fasilitas kesehatan

kurang memadai maka pelayanan kesehatan juga berkurang sehingga kesehatan masyarakat menjadi terabaikan.

Gambar 2.9

Puskemas Pembantu Kawasan Perdesaan Bukit Hagu



Sumber : Survei Lapangan Tahun 2020

Kawasan perdesaan transmigrasi memiliki beberapa sarana pelayanan kesehatan walau tidak setingkat rumah sakit diperkotaan, namun ada satu unit Puskesmas lengkap dengan 4 orang dokter, 6 bidan dan 11 perawat, berikut fasilitas kesehatan yang ada di kawasan Perdesaan Transmigrasi.

Tabel 2.19

Ketersediaan dan Kemudahan Akses Layanan Kesehatan

Desa Gampong	Sarana Layanan Kesehatan				
	PKM	Pustu	P. Dokter	Posyandu	Polindes
Alue Leuhob	-	1	-	1	-
Buket Hagu	1	2	-	6	5
Cinta Makmur	-	-		1	1
Babussalam	-	1	-	1	1

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

3) Sarana Ekonomi

Seluruh kegiatan yang bersifat jual beli disebut dengan pasar walaupun bentuk dan fasilitas tidak sepenuhnya layaknya pasar, apalagi dijaman sosmed saat ini siapapun dan dimanapun tidak terbatasi oleh waktu dan tempat kegiatan yang lumrah terjadi dipasar bisa dilakukan dengan jari tangan di gadget.Namun ketersediaan pasar dan bahan perekonomian merupakan suatu gambaran kegairahan dan kehidupan perekonomian suatu kawasan, tidak terkecuali kawasan Perdesaan Transmigrasi.

Gambar 2.10
Pasar Desa Bukit Hagu



Sumber : Survei Lapangan Tahun 2020

Walau hanya memiliki satu pasar yaitu di desa Bukit Hagu, namun kawasan ini memiliki banyak sarana jual beli lainnya yang tersedia seperti kios/took terbanyak berada di desa Babussalam ada 73, berikut terlampir ketersediaan akses pasar dan sarana pendukungnya.

Tabel 2.20
Ketersediaan Akses pada Pasar

Desa/ Gampong	Pasar	Mini Market	Kios/Toko	Kedai ma/mi
Alue Leuhob	1	-	33	14
Buket Hagu	-	-	29	4
Cinta Makmur	-	-	51	7
Babussalam	-	-	73	15

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019 (diolah)

Selain pasar kawasan Transmigrasi juga memiliki Badan Usaha Milik Gampong yang difungsikan sebagai tempat transaksi hasil bumi, koperasi simpan pinjam dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang terjadi perputaran keuangan didalamnya.

Tabel 2.21
Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan KOPERASI

Kecamatan	Desa/Gampong	BUMG	KOPERASI
Cot Girek	Alue Leuhob	1	1
Lhoksukon	Buket Hagu	1	1
Baktiya	Cinta Makmur	1	1
	Babussalam	1	1

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

Gambar 2.11
Komplek Kantor Kepala Desa



Sumber : Survei Lapangan Tahun 2020

4) Sarana Produksi

Kawasan perdesaan Transmigrasi Kabupaten Aceh Utara terdapat 4 buah BUMG dan Koperasi, dan beberapa kelompok tani dan usaha industry, berikut daftar sarana produksi sesuai dengan kegiatannya seperti industry makanan dan minuman, industry yang bergerak bidang pengolahan logam/bengkel, industry hand skraf (kerajinan tangan) dan anyaman.

Gambar 2.12
Gedung BUMG Desa Cinta Makmur



Sumber : Survei Lapangan Tahun 2020

Tabel 2.22
Jumlah industry kecil/mikro dan UMKM

Desa/ Gampong	Industri kecil, mikro/UMKM			
	Makanan/ Minuman	Barang dari logam	Anyaman	Kerajinan
Alue Leuhob	-	-	2	-
Buket Hagu	12	3	7	27
Cinta Makmur	4	-	2	6
Babussalam	13	-	4	12

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2019

5) Sarana Sosial Budaya

Lingkungan social budaya dipengaruhi oleh aktifitas social dan budaya penduduk, baik penduduk setempat maupun pendatang. Sekelompok pendatang yang suatu komunitas akan membentuk budaya yang dibawanya, demikian juga halnya social budaya kawasan transmigrasi memiliki khas tersendiri selain berkembang aktifitas lingkungan setempat juga membangun kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di daerah asalnya. Untuk melakukan aktifitas tersebut membutuhkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, dari pengamatan tim penyusun diketahui bahwa di kawasan perdesaan transmigrasi ini memiliki beberapa bangunan balai pertemuan, lapangan bola dan rumah ibadah sebagai sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan aktifitas social budaya.

Gambar 2.13
Mesjid kawasan Perdesaan Transmigrasi Bukit Hagu



Sumber : Survei Lapangan Tahun 2020

Gambar 2.14
Lapangan Bola Kaki



Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020

Tabel 2.23
Ketersediaan Sarana Sosial Budaya dan Agama

Desa/Gampong	Sarana Sosial Budaya dan Agaman				
	Sepak Bola	Bola Voli	Balai desa	Mesjid	Meunasah
Alue Leuhob	1	3	-	1	1
Buket Hagu	1	1	1	2	1
Cinta Makmur	1	1	-	1	1
Babussalam	1	2	-	1	1

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

Gambar 2.15
Balai Pengajian Kawasan Perdesaan Transmigrasi



Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020

a. Sarana Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi terdiri dari beberapa komponen berupa jalan dan kendaraan, jalan menjadi urat nadi aktifitas masyarakat termasuk kegiatan perekonomian oleh karena itu keberadaannya menjadi penting. Sejauh ini jalan di kawasan Transmigrasi memiliki tiga kelompok yakni jalan aspal, jalan pengerasan batu dan jalan tanah.

Gambar 2.16

Prasarana Jalan

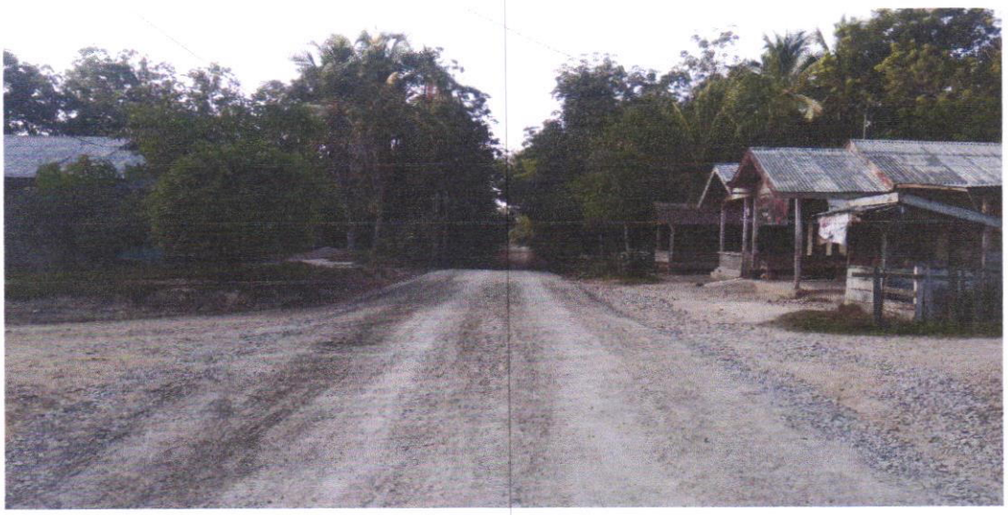

Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020

Tabel 2.24

Ketersediaan Aksesbilitas Jalan Utama dan angkutan Umum

Desa	Kondisi Jalan			Angkutan Umum	
	Aspal	Perkerasan	Tanah	Ada	Tidak ada
Alue Leuhob	√	-	-	√	
Buket Hagu	-	√	-	√	
Cinta Makmur	-	√	-	√	
Babussalam	-	√	-	√	

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

b. Sarana Prasarana Energi dan Informasi

Sebagai wilayah pegunungan yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan energy dan komunikasi merupakan hal penting lainnya yang harus dimiliki oleh suatu kawasan perdesaan Transmigrasi, saat ini telah ada sarana energi dan telekomunikasi yaitu PT. PLN dan Telkomsel selaku pensuport utama energi penerangan dan komunikasi ini selain itu ada juga pangkalan GAS LPG sebagai

penunjang kegiatan dalam memasak. Berikut rumah tangga pengguna penerangan listrik dan desa yang memiliki akses internet.

Tabel 2.25
Desa yang tersedia akses internet dan Rumah Tangga pengguna Alat Penerangan

Desa/Gampong	Akses internet		Alat Penerangan	
	Ada	Tidak ada	Listrik	Non Listrik
Alue Leuhob	√		452	-
Buket Hagu	√		440	10
Cinta Makmur	√		139	5
Babussalam	√		396	12

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

Kawasan Perdesaan di kawasan transmigrasi memiliki dominasi penggunaan lahan berupa perkebunan. Hanya sebagian kecil daerahnya yang dimanfaatkan sebagai areal pertanian, dan permukiman. Perkebunan terdiri dari kebun kacang panjang, ketimun, terong, cabe besar, cabe rawit, tomat, kangkung, bayam . Adapun persawahan yang di dominasi oleh desa buket hagu dengan luas 1.322 Ha.

Tabel 2.26
Luas Desa dan Penggunaan Lahan Tahun 2018

No	Desa/ Gampong	Luas Desa (Ha)	Penggunaan Lahan	
			Lahan Sawah	Bukan Sawah
1	Alue Leuhob	1.322	-	1.322
2	Buket Hagu	2.186	-	2.186
3	Cinta Makmur	522	16	506
4	Babussalam	1.123	23	1.100

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

Tabel 2.27
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Tahun 2018

No	Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Kacang Panjang	9	10	31,00	310,00
2	Cabe Besar	2	5	33,20	166,00
3	Cabe Rawit	3	6	28,00	168,00
4	Tomat	-	-	-	-
5	Terong	2	2	0,00	-
6	Ketimun	3	2	108,50	217,00
7	Kangkung	5	3	38,33	115,00
8	Bayam	5	4	19,25	

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Aceh Utara 2019

Secara umum pengembangan Kawasan perdesaan melalui pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Aceh Utara

telah dilaksanakan sejak tahun 1975, ini ditandai dengan terbentuknya Unit Pengelola Transmigrasi (UPT) I Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek dan UPT II Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon. Lebih lanjut pada tahun 1978 dan 1980 terbentuk lagi UPT III Bola Mas dan UPT IV Seureke di Kecamatan Langkahan. Pada tahun 1981 terbentuk lagi UPT V Langkahan di Gampong Babussalam dan UPT VI Buket Hagu di Gampong Cinta Makmur Kecamatan Baktiya.

Hingga tahun 2017 UPT yang telah terbentuk sebanyak 20 UPT dengan berbagai kondisi perkembangan dilapangan, baik masih dalam pembinaan maupun sudah berjalan/berkembang. Jumlah UPT di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.28
Jumlah Transmigrasi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 1975 - 2016

No	Nama Lokasi Transmigrasi	Desa	Kecamatan	Tahun Penempatan	Jlh Penempatan		Jlh Sekarang		Ket
					KK	Jiwa	KK	Jiwa	
1	UPT I Alue Leuhob	Alue Leuhob	Cot Girek	1975/ 1976	300	1231	325	1331	-
2	UPT II Buket Hagu	Buket Hagu	Lhoksukon	1975/ 1976	500	750	628	3140	-
3	UPT III Bola Mas	Bola Mas	Langkahan	1978/ 1979	150	657	165	825	-
4	UPT IV Seureuke	Seureuke	Langkahan	1980/ 1981	700	1010	752	1200	-
5	UPT V Langakahan	Babussalam	Baktiya	1981/ 1982	400	1600	210	840	-
6	UPT IV Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	1984/ 1985	425	2125	230	920	-
7	Leubok Tilam	Leubok Tilam	Cot Girek	2001	100	515	60	250	-
8	UPT VII Seureuke	Seureuke	Langkahan	2007	700	2800	720	2880	-
9	UPT I Pirsus Kr. Pase	Pase Sentosa	Sp. Keuramat	1985	494	1976	300	1275	-
10	UPT II Pirsus Kr. Pase	Suka Damai	Geureudong Pase	1986	500	2000	200	839	-
11	UPT III Pirsus Kr. Pase	Makarti	Tanah Luas	1989	200	800	99	835	-
12	Jeulikat	Jeulikat	Nisam	2008	120	482	15	60	-
13	PMU Sawang	Riseh Tunong	Sawang	2006	153	638	153	638	-
14	Buket Jrat Manyang	Buket Jrat Manyang	Tanah Jambo Aye	2008	120	516	131	640	-
15	Alue II	Krueng Tuan	Nisam Antara	2013	36	162	36	162	-

No	Nama Lokasi Transmigrasi	Desa	Kecamatan	Tahun Penempatan	Jlh Penempatan		Jlh Sekarang		Ket
					KK	Jiwa	KK	Jiwa	
16	Alue Dua II	Krueng Tuan	Nisam Antara	2014	92	299	92	299	-
17	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2013	100	453	100	453	Dlm Pembinaan
18	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2014	30	126	30	126	Dlm Pembinaan
19	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2015	50	242	50	242	Dlm Pembinaan
20	UPT V Langkahan	Babussalam	Baktiya	2016	50	153	50	153	Dlm Pembinaan
	Jumlah				5220	18535	4346	17108	

Sumber : DPM Transnaker Kabupaten Aceh Utara, 2017

Dilihat dari tabel diatas memang pengembangan kawasan transmigrasi UPT I Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek dan UPT II Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon merupakan UPT perintis dan saat ini lebih maju dan berkembang dibanding dengan lokasi UPT lainnya.Demikian pula dengan beberapa UPT lainnya yang juga berkembang seperti UPT IV Seureke kecamatan Langkahan.Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa yang menempatkan Kabupaten Aceh Utara menjadi lokus Transmigrasi Prioritas Bidang RPJMN 2020-2024 yaitu Kawasan Transmigrasi Cot Girek sebagaimana Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi (P2RKT).

Dalam mempercepat P2RKT, Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan Lokus P2RKT sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang terdiri dari Kawasan Transmigrasi prioritas nasional sebanyak 52 (lima puluh dua) Kawasan Transmigrasi dan prioritas bidang sebanyak 88 (delapan puluh delapan). Dari agenda program kementerian ini Kabupaten Aceh Utara menjadi salah satu Kabupaten lokus Transmigrasi Prioritas Bidang RPJMN 2020-2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.29
Kawasan Transmigrasi Prioritas Bidang RPJMN 2020-2024

No	Provinsi	Kabupaten	Nama Kawasan
1	Aceh	Aceh Besar	1. Jantho 2. Seulimeum
		Aceh Jaya	3. Patek
		Aceh Utara	4. Cot Girek
		Bener Meriah	5. Pintu Rime Gayo
		Bireun	6. Harus Muda Jaya
		Aceh Barat	7. Woyla
		Aceh Barat Daya	8. Babahrot
			9. Lembah Sabil
		Subulussalam	10 . Subulussalam
		Simeulu	11 . Latiung

Sumber : DPM Transnaker Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2017

2.2.4 Kawasan Minapolitan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, Minapolitan didefinisikan sebagai konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Sedangkan secara definitif Minapolitan terdiri dari dua suku kata yaitu Mina yang berarti perikanan dan Polis yang berarti kota, sehingga Minapolitan berarti kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama adanya kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan.

Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi Tim Penyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan telah ditetapkan 6 (enam) gampong di 2 (dua) kecamatan yang termasuk dalam kawasan minapolitan yaitu :

1. Kecamatan Seunuddon
   - Gampong Ulee Rubek Barat
   - Gampong Ulee Rubek Timu
   - Gampong Teupin Kuyuen

- Gampong Ulee Matang

2. Kecamatan Lapang
   - Gampong Kuala Cangkoi
   - Gampong Matang Tunong

2.2.4.1 Deskripsi Kawasan Minapolitan

a. Fisik Dasar

1) Luas dan Batas Wilayah Kawasan Minapolitan

Kecamatan Seunuddon mempunyai luas 100,63 Km^2 dengan jumlah gampong sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Gampong. Dari 33 (tiga puluh tiga) gampong di Kecamatan Seunuddon, terpilih 4 (empat) gampong yang akan difasilitasi dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan. Secara geografis keempat Gampong ini berada pada bagian utara Kecamatan Seunuddon atau wilayah pesisir. Kawasan perdesaan ini memiliki batas administrasi sebagai berikut :

- Utara : Selat Malaka dan Gampong Bantayan
- Timur : Kabupaten Aceh Timur dan Gampong Matang Anoe
- Selatan: Gampong Matang Lada dan Gampong Matang Karieng
- Barat : Gampong Lhok Puuk

Sedangkan Kecamatan Lapang mempunyai luas 21,88 Km^2 yang terdiri dari 11 (sebelas) gampong. Dari 11 (sebelas) gampong di Kecamatan Lapang, terpilih 2 (dua) gampong yang akan difasilitasi yang secara geografis berada dalam batas administrasi sebagai berikut :

- Utara : Selat Malaka
- Timur : Kecamatan Baktiya Barat
- Selatan : Gampong Geulanggang Baro
- Barat : Gampong Matang Baroh

Tabel 2.30
Luas Wilayah Menurut Gampong di Kawasan Perdesaan Minapolitan

No	Kecamatan/Gampong	Luas (Km^2)	Persentase (%)
I	*Kecamatan Seunuddon*	*15.2*	*70.63*
1	Ulee Rubek Barat	4.36	20.26
2	Ulee Rubek Timu	3.35	15.57
3	Teupin Kuyuen	3.67	17.05
4	Ulee Matang	3.82	17.75

No	Kecamatan/Gampong	Luas (Km^2)	Persentase (%)
II	*Kecamatan Lapang*	*6.32*	*29.37*
1	Kuala Cangkoi	3.02	14.03
2	MatangTunong	3.3	15.33
Total		21.52	100

Sumber :Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020, diolah

2) Topografi

Secara topografi Kawasan Perdesaan Minapolitan termasuk dalam kategori daerah dataran rendah yang secara umum terbagi dalam beberapa wilayah yaitu perumahan (permukiman), persawahan, perkebunan, pertambakan, pantai dan industri garam.

b. Sosial Budaya

1) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu komponen dalam wilayah yang memegang peranan penting sebagai sumber daya atau pelaku pembangunan sekaligus juga sebagai penerima manfaat. Dinamika kependudukan perlu dianalisis sebagai bagian dari dinamika perkembangan wilayah. Jumlah penduduk di kawasan minapolitan selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,42 persen. Dari 6 (enam) Gampong dalam kawasan minapolitan, Gampong Kuala Cangkoi Kecamatan lapang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 2.574 jiwa pada tahun 2019.

Tabel 2.31
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kawasan Perdesaan Minapolitan Kabupaten Aceh Utara

No	Kecamatan/ Gampong	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Laju Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	
I	Kecamatan Seunuddon	5.218	5.282	5.332	5.422	1.29
1	Ulee Rubek Barat	1.621	1.644	1.658	1.681	1.22
2	Ulee Rubek Timu	1.160	1.165	1.181	1.211	1.44
3	Teupin Kuyuen	1.140	1.156	1.167	1.188	1.38
4	Ulee Matang	1.297	1.317	1.326	1.342	1.14
II	Kecamatan Lapang	3.155	3.245	3.256	3.574	4.24
1	Kuala Cangkoi	2.286	2.336	2.343	2.574	4.03
2	Matang Tunong	869	909	913	1.000	4.79
Total		8.373	8.527	8.588	8.996	2.42

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020, diolah

2) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk pada kawasan perdesaan minapolitan tahun 2019 adalah 418 jiwa/km^2, artinya setiap kilometer persegi dihuni oleh sekitar 418 jiwa. Gampong Kuala Cangkoi memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 852 jiwa/km^2, sedangkan kepadatan penduduk terendah ada di Gampong Matang Tunong yaitu 303 jiwa/Km^2. Dilihat dari kepadatan rumah tangga, kawasan perdesaan minapolitan memiliki kepadatan rumah tangga sekitar 105 rumah tangga/km^2.

Tabel 2.32
Kepadatan Penduduk Kawasan Perdesaan Minapolitan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019

No	Kecamatan/ Gampong	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Kepadatan Penduduk (RT/Km2)
I	Kecamatan Seunuddon	15.2	5422	1381	357	91
1	Ulee Rubek Barat	4.36	1681	461	386	106
2	Ulee Rubek Timu	3.35	1211	354	361	106
3	Teupin Kuyuen	3.67	1188	289	324	79
4	Ulee Matang	3.82	1342	277	351	73
II	Kecamatan Lapang	6.32	3574	888	566	141
1	Kuala Cangkoi	3.02	2574	652	852	216
2	Matang Tunong	3.3	1000	236	303	72
Total		21.52	8996	2269	418	105

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020, diolah

3) Komposisi Penduduk

Dintinjau dari komposisi penduduk, kawasan perdesaan minapolitan didominasi oleh penduduk perempuan dengan jumlah 8.996 jiwa dengan rasio 97,58 dapat diartikan setiap 97 laki-laki terdapat 100 orang perempuan.

Tabel 2.33
Komposisi Penduduk Kawasan Perdesaan Minapolitan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019

No	Kecamatan/ Gampong	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
I	Kecamatan Seunuddon	2.679	2.743	5.422	97.67
1	Ulee Rubek Barat	817	864	1.681	94.56
2	Ulee Rubek Timu	612	599	1.211	102.17
3	Teupin Kuyuen	590	598	1.188	98.66
4	Ulee Matang	660	682	1.342	96.77

Tabel 2.34
Luas Tambak Menurut Teknologi Budidaya di Kawasan Perdesaan Minapolitan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

NO	Kecamatan/ Gampong	Luas Tambak Menurut Teknologi Budidaya (Ha)			Jumlah Total
		Tradisional	Semi Intensif	Intensif	
I	Kecamatan Seunuddon	1.149	23	-	1.172
1	Ulee Rubek Barat	167	-	-	167
2	Ulee Rubek Timu	75	-	-	75
3	Teupin Kuyuen	108	10	-	118
4	Ulee Matang	799	13	-	812
II	Kecamatan Lapang	143	75	-	218
1	Kuala Cangkoi	8	-	-	8
2	Matang Tunong	135	75	-	210
Jumlah Total		1.292	98	-	1.390

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Tabel 2.35
Produksi Tambak Menurut Teknologi Budidaya di Kawasan Perdesaan Minapolitan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

NO	Kecamatan/ Gampong	Produksi Tambak Menurut Teknologi Budidaya (Ton)			Jumlah Total
		Tradisional	Semi Intensif	Intensif	
I	Kecamatan Seunuddon	201,09	6,9	-	207,99
1	Ulee Rubek Barat	29,23	-	-	29,23
2	Ulee Rubek Timu	13,13	-	-	13,13
3	Teupin Kuyuen	18,90	3	-	21,90
4	Ulee Matang	139,83	3,90	-	143,73
II	Kecamatan Lapang	54	24	-	78
1	Kuala Cangkoi	-	-	-	-
2	Matang Tunong	54	24	-	78
Jumlah Total		255,09	30,9	-	285,99

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

5) Sarana dan Prasarana

a) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan minapolitan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36
Fasilitas Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2020

No	Kecamatan/ Gampong	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ MA	SMK	
I	Kecamatan Seunuddon	3	3	-	-	6
1	Ulee Rubek Barat	1	1	-	-	2
2	Ulee Rubek Timu	-	1	-	-	1
3	Teupin Kuyuen	1	-	-	-	1
4	Ulee Matang	1	1	-	-	2
II	Kecamatan Lapang	2	1	-	1	4
1	Kuala Cangkoi	1	-	-	-	1
2	Matang Tunong	1	1	-	1	3
Total		5	4	-	1	10

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

b) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan yang didukung oleh fasilitas yang memadai dan pelayanan yang baik. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan perdesaan minapolitan Kabupaten Aceh Utara dalah sebagai berikut :

Tabel 2.37
Fasilitas Kesehatan di Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2020

No	Kecamatan/ Gampong	PKM	Pustu	Praktek Bidan	Posyandu	Polindes
I	Kecamatan Seunuddon					
1	Ulee Rubek Barat	-	-	-	1	1
2	Ulee Rubek Timu	-	-	1	1	-
3	Teupin Kuyuen	-	-	-	1	-
4	Ulee Matang	-	-	1	1	-
II	Kecamatan Lapang					
1	Kuala Cangkoi	-	-	-	2	1
2	Matang Tunong	-	-	-	1	1
Total		-	-	2	7	3

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020, diolah

c) Sarana dan Prasarana Ekonomi

Sarana dan prasarana ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan suatu kawasan. Pasar merupakan salah satu tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat. Dari semua gampong dalam kawasan perdesaan minapolitan, hanya Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon yang memiliki pasar, itupun pasar tidak permanen. Namun semua gampong memiliki prasarana ekonomi lainnya yaitu toko, kios dan kedai makanan/minuman. Ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi di kawasan minapolitan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.38
Jumlah Sarana Perdagangan di Kawasan Minapolitan
Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2019

No	Kecamatan /Gampong	Pasar dengan Bangunan		Toko/Kios	Kedai Makan/ Minum
		Permanen	Tidak Permanen		
I	Kecamatan Seunuddon				
1	Ulee Rubek Barat	-	-	11	9
2	Ulee Rubek Timu	-	-	12	5
3	Teupin Kuyuen	-	-	23	1
4	Ulee Matang	-	7	9	2
II	Kecamatan Lapang				
1	Kuala Cangkoi	-	-	25	3
2	Matang Tunong	-	-	3	3
Total		-	7	83	23

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019

d) Sarana dan Prasarana Produksi

Kawasan perdesaan minapolitan didukung oleh sarana dan prasarana seperti saluran air untuk menjaga ketersediaan air tambak, tempat pendaratan ikan. Tempat pelelangan ikan, kapal motor penangkap ikan, perahu motor tempel, perahu tanpa motor dan alat tangkap. Selain itu di Gampong Teupin Kuyuen

Kecamatan Seunuddon dan Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang juga memiliki sarana dan prasarana produksi garam.

e) Sarana dan Prasarana Sosial Budaya

Kawasan perdesaan minapolitan juga mempunyai sarana dan prasarana sosial budaya yang merupakan sarana pendukung bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial budaya seperti tempat ibadah dan lapangan olahraga. Semua gampong kawasan perdesaan minapolitan di Kecamatan Seunuddon memiliki masjid dan meunasah sebagai tempat ibadah. Semua gampong memiliki lapangan sepakbola dan/atau lapangan voli kecuali Gampong Ulee Rubek Timu yang tidak memiliki sarana olahraga. Sedangkan kawasan perdesaan minapolitan di Kecamatan Lapang, Gampong Matang Tunong memiliki Masjid dan Meunasah, sedangkan Gampong Kuala Cangkoi memiliki Meunasah dan Mushalla. Kedua gampong memiliki sarana olahraga.

f) Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Semua gampong dalam kawasan perdesaan minapolitan memiliki kantor desa sebagai sarana pemerintahan, namun tidak ada yang memiliki balai desa atau balai pertemuan. Kantor desa pada umumnya terletak dalam lokasi berdekatan dengan meunasah yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan sekaligus sebagai tempat pertemuan warga.

g) Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi sangat penting dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dalam menghubungkan gampong-gampong dalam kawasan perdesaan minapolitan dan menghubungkan kawasan tersebut dengan ibukota kecamatan. Sejauh ini jalan dibagi dalam dua jenis yaitu jalan aspal dan jalan tanah. Jalan aspal telah menghubungkan gampong-gampong dalam kawasan perdesaan minapolitan di Kecamatan Seunuddon ke ibukota kecamatan. Namun, jalan-jalan menuju tempat produksi masih ada yang belum beraspal, seperti jalan akses dari pinggir pantai di Gampong Ulee Rubek Barat dan Ulee Rubek Timu sehingga menyulitkan nelayan saat mengangkut hasil tangkapan menuju jalan akses ke ibukota

kecamatan. Demikian juga jalan dan jembatan menuju tambak di Gampong Ulee Matang, kondisinya belum memadai.

h) Sarana dan Prasarana Air Bersih

Kawasan perdesaan minapolitan yang terletak di wilayah pesisir merupakan wilayah yang kesulitan memperoleh air bersih. Belum semua gampong terjangkau pelayanan air PAM. Jumlah rumah tangga menurut sumber air minum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.39
Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kawasan Perdesaan Minapolitan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

No	Kecamatan/Gampong	PAM	Sumur	Sungai
I	Kecamatan Seunuddon	211	5.211	-
1	Ulee Rubek Barat	-	1.681	-
2	Ulee Rubek Timu	-	1.211	-
3	Teupin Kuyuen	-	1.188	-
4	Ulee Matang	211	1.131	-
II	Kecamatan Lapang	644	-	218
1	Kuala Cangkoi	626	-	-
2	Matang Tunong	18	-	218
Total		855	5.211	218

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

i) Sarana dan Prasarana Sanitasi

Berdasarkan hasil survey lapangan diketahui bahwa kesadaran masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat telah cukup baik. Sebagian besar rumah tangga di kawasan perdesaan minapolitan telah memiliki jamban sendiri.

2.2.5 Kawasan Agropolitan

Agropolitan adalah sebuah kota dengan berbasis pada sektor pertanian yang tumbuh dan berkembang dengan baik, hal tersebut dikarenakan bejalannya suatu sistem dan usaha. Agribisnis sehingga mampu melayani, mendorong dan menghela kegiatan pembangunan pertanian Pengembangan kawasan Agropolitan sangat cocok untuk pengembangan wilayah perdesaan dimana konsep Agropolitan ini tidak hanya sekedar untuk pembangunan fisik saja, akan tetapi untuk pengembangan masyarakat dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia agar dapat berkembang dan bersaing dengan daerah lain Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi Tim Penyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

telah ditetapkan 4 (empat) gampong di 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam kawasan minapolitan yaitu:

1. Kecamatan Sawang
- Gampong Riseh Tunong
2. Kecamatan Sp. Keuramat
- Gampong Ie Tarek
3. Kecamatan Banda Baro
- Gampong Ulee Nyeu
4. Kecamatan Baktiya
- Gampong Alue Bili Rayeuk

2.2.5.1.Deskripsi Kawasan Agropolitan

Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Beberapa daerah yang sudah ditetapkan tim untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan diharapkan mampu menerapkan konsep agropolitan untuk kemajuan gampong. Mayoritas kondisi sosial ekonomi atau mata pencahariannya adalah bertani dan berkebun serta beternak.

a. Penggunaan Lahan Gampong

Penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia terhadap lahan, baik secara menetap maupun berkala untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. Pemanfaatan lahan juga modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan permukiman. Untuk penggunaan lahan dikawasan agropolitan beragam, antar gampong terdapat penggunaan lahan yang heterogen seperti tabel berikut:

Tabel 2.40
Penggunaan lahan kawasan Agropolitan berdasarkan gampong

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Gampong Riseh Tunong		
1.	Pemukiman penduduk	523
2.	Sawah	107
3.	Ladang produktif	65
4.	Ladang tidak produktif	84
5.	Perkebunan	5950
6.	Agribisnis dan holtikultur	43
7.	Irigasi, jalan dan kuburan umum	128
Gampong Ie Tarek		
1.	Sawah	60
	a. Saluran air teknis	40
	b. Saluran semi teknis	20
	c. Tadah hujan	-
2.	Bukan Sawah	90
	a. Perkebunan	60
	b. Pekarangan	-
	c. Lain – lain (Jalan, makan dan sungai)	
Gampong Ulee Nyeu		
1.	Luas pemukiman / Perumahan	201
2.	Persawahan	170
3.	Tanah luas gampong	1,3
4.	Luas lahan terlantar	187
5.	Luas tanah terlantar	3,2
6.	Durian	2

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

b. Potensi Perekonomian Gampong

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian

nasional maupun gampong. Untuk sektor pertanian di kawasan agropolitan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Sektor Pertanian kawasan Agropolitan berdasarkan gampong

No	Komoditi	Luas (Ha)
Gampong Riseh Tunong		
1.	Durian	50
2.	Langsat	5
3.	Rambutan	2
4.	Manggis	1
5.	Bawang merah	2
6.	Cabe merah	1,5
7.	Cabe rawit	2
8.	Timun	5
9.	Kakao	60
10.	Pinang	731
11.	Sawit	300
12.	Kopi	160
Gampong Ie Tarek		
1.	Padi	120
2.	Jagung	5
3.	Kacang Tanah	2
4.	Rambutan	7
5.	Langsat	15
6.	Durian	2
7.	Ubi Keriting	2
8.	Jengkol	5
9.	Sawit	500
10.	Karet	52
11.	Kakao	75
Gampong Ulee Nyeu		
1.	Padi	370
2.	Kacang tanah	3,5
3.	Cabe	2
4.	Bawang merah	1,6
5.	Kelapa	60
6.	Kakao	70

No	Komoditi	Luas (Ha)
7.	Pinang	62
8.	Sawit	15,5
Gampong Alue Bili Rayeuk		
1.	Padi	130
2.	Timun	11
3.	Cabe	3
4.	Bayam	2
5.	Jagung	13
6.	Rambutan	20

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 2.17

Persawahan dalam kawasan Agropolitan



Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020

c. Sektor Perkebunan

Untuk sektor perkebunan di kawasan agropolitan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42

Sektor perkebunan kawasan agropolitan berdasarkan gampong

No	Sumber daya alam	Luas (Ha)
Gampong Riseh Tunong		
1.	Pinang	731
2.	Sere wangi	20
3.	Nilam	5
4.	Kelapa sawit	300
5.	Kopi	160

No	Sumber daya alam	Luas (Ha)
6.	Jernang	10
7.	Jengkol	5
8.	Kakao	60
Gampong Ie Tarek		
1.	Kelapa sawit	500
2.	Karet	52
3.	Kakao	75
Gampong Ulee Nyeu		
1.	Kelapa	60
2.	Coklat	2
3.	Pinang	62
4.	Kelapa sawit	12,5
5.	Kakao	70

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 2.18
Kelompok Ternak Desa Blang Teurakan



Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020

Gambar 2.19
Potensi Perkebunan Kawasan Perdesaan Agropolitan



Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020

d. Sektor Peternakan

Sektor peternakan merupakan sektor yang cukup penting di dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Produk peternakan merupakan sumber protein hewani. Ternak sapi, khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber penghasilan protein hewani, yaitu berupa daging yang bernilai ekonomi. Suatu desa atau gampong sangat membutuhkan sektor peternakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Untuk lebih jelas dapat dilihat sektor peternakan kawasan agropolitan sebagai berikut:

Tabel 2.43
Sektor peternakan kawasan agropolitan berdasarkan gampong

No	Populasi	Jumlah (ekor)
Gampong Ie Tarek		
1.	Sapi	70
2.	Kambing	20
Gampong Ulee Nyeu		
1.	Sapi	82
2.	Kambing	30
3.	Domba	27

No	Populasi	Jumlah (ekor)
4.	Ayam	200
5.	Bebek	125
6.	Hijauan makanan ternak	15 Ha
Gampong Alue Bili Rayeuk		
1.	Sapi	40
2.	Kerbau	10
3.	Kambing/ Domba	100

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

e. Sarana dan prasarana

1) Sarana dan prasarana Pendidikan

Salah satu aspek yang seharusnya mendapatkan perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah sarana pendidikan sebagai penunjang keberhasilan suatu proses. Upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dalam sebuah masyarakat atau yang berhak untuk mendapatkan pendidikan secara proses belajar dan mengajar melalui fasilitas pendidikan disekolah. Adapun sarana dan prasarana pendidikan untuk 4 (empat) gampong dan 4(empat) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Fasilitas pendidikan menurut tingkat pendidikan di kawasan Agropolitan

No	Gampong/Kec	Sarana Pendidikan			
		PAUD/TK	SD/ MI	SMP/MTS	SMA/MA/SMK
1	Riseh Tunong Sawang	5	3	1	-
2	Ulee Nyeu Banda baro	1	2	2	-
3	Ie Tarek Sp. Keuramat	1	-	-	-
4	Alue Bili Rayeuk Baktiya	1	1	2	3

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

2) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Mengingat pentingnya pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk sehingga sarana dan prasarana kesehatan menjadi prioritas maupun peran yang terpenting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun wadah atau tempat penyaluran pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui rumah sakit, puskesmas maupun sarana kesehatan lainnya sebagaimana yang tertulis pada tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Fasilitas Kesehatan dalam kawasan Agropolitan

No	Gampong/Kec	Puskesmas	Poswindu	Pos yandu	Pustu	Polindes	Praktek Bidan
1	Riseh Tunong Sawang	-	-	5	-	-	1
2	Ulee Nyeu Banda baro	-	1	1	1	-	-
3	Ie Tarek Sp. Keuramat	-	-	1	-	-	-
4	Alue Bili Rayeuk Baktiya	-	-	1	-	-	4

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

3) Sarana dan Prasarana Ekonomi

Perkembangan ekonomi suatu wilayah selain dapat diukur dengan indikator perekonomian, juga diukur dengan jumlah sarana dan prasarana perekonomian. Adapun jumlah sarana dan prasarana ekonomi dalam kawasan Agropolitan sebagai berikut:

Tabel 2.46
Sarana dan Prasarana ekonomi dalam kawasan Agropolitan

No	Gampong/Kec	BUMG	Mini Market/ Pertokoan	Rumah Makan Restoran	Kios Tani
1	Riseh Tunong Sawang	1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ulee Nyeu Banda baro	1	Ada	Ada	Tidak ada
3	Ie Tarek Sp. Keuramat	1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Alue Bili Rayeuk Baktiya	1	Ada	Ada	Tidak Ada

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

4) Fasilitas Olahraga

Fasilitas Olahraga merupakan sebuah fasilitas yang diharapkan, khususnya oleh kalangan anak muda. Untuk dapat menyalurkan bakat ataupun keahliannya masing-masing dibidang olahraga. Adapun ketersedian fasilitas olahraga dikawasan Agropolitan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.47
Fasilitas Olahraga dalam Kawasan Agropolitan

No	Gampong/Kec	Ketersediaan Fasilitas Olahraga
1	Riseh Tunong Sawang	Ada
2	Ulee Nyeu Banda baro	Ada
3	Ie Tarek Sp. Keuramat	Tidak Ada
4	Alue Bili Rayeuk Baktiya	Ada

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

5) Fasilitas Angkutan Umum

Angkutan umum merupakan sebuah alat transportasi masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas dengan cepat, sehingga dengan adanya ketersediaan angkutan umum dalam sebuah kawasan dapat mempermudah aktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari ataupun sebagai sarana transportasi untuk siswa-siswi dalam sebuah kawasan dalam permukiman masyarakat.

Tabel 2.48
Fasilitas Angkutan Umum dalam kawasan Agropolitan

No	Gampong/Kec	Ketersediaan Angkutan Umum
1	Riseh Tunong Sawang	Tidak Ada
2	Ulee Nyeu Banda baro	Ada
3	Ie Tarek Sp. Keuramat	Tidak Ada
4	Alue Bili Rayeuk Baktiya	Ada

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

6) Sarana produksi

Kawasan Agropolitan juga didukung dengan sarana produksi seperti di Gampong Ulee Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya, yaitu sarana produksi padi atau kilang padi, sarana produksi ini sangat membantu kelancaran proses panen dan mempercepat proses pengolahan panen. Untuk sarana pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Sarana Pendukung utuk Produksi padi

No	Nama Usaha	Jumlah (unit)
Gampong Alue Bili Rayeuk		
1.	Kilang Padi	4

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 2.20
Kilang Padi Kondisi Depan (luar)



Sumber: Survei Lapangan

Gambar 2.21
Kilang Padi Kawasan Agropolitan Kondisi mesin (dalam)
Alue Bili Baktiya Aceh Utara.

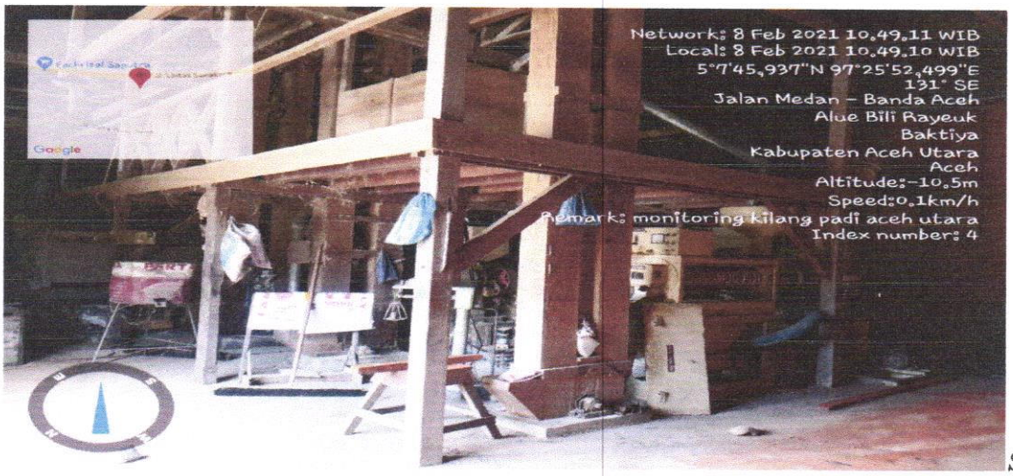

Sumber: Survei Lapangan

2.2.6 Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Secara topografi wilayah perdesaan kawasan pariwisata termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dan juga dataran tinggi yang secara umum terbagi dalam beberapa wilayah yaitu perumahan (permukiman), persawahan, perkebunan, pertambakan, pantai dan industri garam. Untuk luas wilayah kawasan pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Luas Wilayah Menurut Gampong di Kawasan Perdesaan Pariwisata

No	Kecamatan/Gampong	Luas (Km^2)	Persentase (%)
I	Kecamatan Seunuddon	100,63	100
1	Bantayan	2,90	2,88
II	Kecamatan Samudera	43,28	100
1	Beuringen	1,0	2,3
2	Kuta Krueng	1,10	2,5
III	Kecamatan Syamtalira Bayu	77,53	100
1	Lancok	2,00	2,58

No	Kecamatan/Gampong	Luas (Km^2)	Persentase (%)
IV	Kecamatan Kuta Makmur	151,32	100
1	Lhok Jok	4,5	2.97
2	Saweuk	4	2.64
3	Panton Rayeuk I	10,25	6.77
V	Kecamatan Nisam Antara	84,38	100
1	Alue Dua	13,36	15,83
Total		457,14	100

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

2.2.6.1 Sosial Budaya

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu komponen dalam wilayah yang memegang peranan penting sebagai sumber daya atau pelaku pembangunan sekaligus juga sebagai penerima manfaat. Dinamika kependudukan perlu dianalisis sebagai bagian dari dinamika perkembangan wilayah. Jumlah penduduk di kawasan pariwisata selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,30 persen. Dari 8 (delapan) Gampong dalam kawasan pariwisata, Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 5.218 jiwa pada tahun 2019.

Tabel 2.51
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kawasan Perdesaan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara tahun 2019

No	Kecamatan/ Gampong	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2016	2017	2018	2019
I	Kecamatan Seunuddon	25.261	25.771	26.101	26.831
1	Bantayan	154	160	167	184
II	Kecamatan Samudera	27.042	27.907	28.688	28.688
1	Beuringen	547	562	577	577
2	Kuta Krueng	1.006	1.289	1.329	1.329
III	Kecamatan Syamtalira Bayu	20.522	20.859	21.175	21.767
1	Lancok	1.286	1.307	1.327	1.364
IV	Kecamatan Kuta Makmur	23.621	24.468	24.468	25.539
1	Lhok Jok	830	840	840	863
2	Saweuk	205	226	226	232

No	Kecamatan/ Gampong	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2016	2017	2018	2019
3	Panton Rayeuk I	728	729	729	749
V	Kecamatan Nisam Antara	13.229	13.353	13.353	14.035
1	Alue Dua	4.771	4.920	4.920	5.218
Total		109.675	112.358	113.785	116.860

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk pada kawasan perdesaan pariwisata tahun 2019 adalah 255,63 jiwa/km^2, artinya setiap kilometer persegi dihuni oleh sekitar 418 jiwa. Gampong Kuta Krueng memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 1.208 jiwa/km^2, sedangkan kepadatan penduduk terendah ada di Gampong Saweuk yaitu 58 jiwa/Km^2. Dilihat dari kepadatan rumah tangga, kawasan perdesaan pariwisata memiliki kepadatan rumah tangga sekitar 24.091 rumah tangga/Km^2.

Tabel 2.52
Kepadatan Penduduk Kawasan Perdesaan Pariwisata
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019

No	Kecamatan/ Gampong	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Kepadatan Penduduk (RT/Km2)
I	Kecamatan Seunuddon	100,63	26.831	6.749	266,63	67,07
1	Bantayan	2,90	184	50	63,45	7,24
II	Kecamatan Samudera	43,28	28.688	6.258	662,85	144,59
1	Beuringen	1,00	577	142	577,00	142,00
2	Kuta Krueng	1,10	1.329	376	1.208	341,82
III	Kecamatan Syamtalira Bayu	77,53	21.767	5.267	280,76	67,93
1	Lancok	2,00	1.364	363	682,00	181,50
IV	Kecamatan Kuta Makmur	151,32	25.539	5.817	168,77	38,44
1	Lhok Jok	4,50	863	201	191,78	44,67
2	Saweuk	4,00	232	49	58,00	12,25
3	Panton Rayeuk I	10,25	749	160	73,07	15,61
V	Kecamatan Nisam Antara	84,38	14.035		166,33	-
1	Alue Dua	13,36	5.218		390,57	-
Total		457,14	116.860	24.091	255,63	52,70

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

c. Komposisi Penduduk

Dintinjau dari komposisi penduduk, kawasan perdesaan Pariwisata didominasi oleh penduduk perempuan dengan jumlah 58.974 jiwa dengan rasio 97,58 dapat diartikan setiap 97 laki-laki terdapat 100 orang perempuan.

Tabel 2.53
Komposisi Penduduk Kawasan Perdesaan Pariwisata
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019

No	Kecamatan/Gampong	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
I	Kecamatan Seunuddon	13.363	13.468	26.831	
1	Bantayan	87	97	184	
II	Kecamatan Samudera	14.229	14.459	28.688	
1	Beuringen	272	305	577	
2	Kuta Krueng	510	554	1.064	
III	Kecamatan Syamtalira Bayu	10.837	10.930	21.767	
1	Lancok	679	685	1.364	
IV	Kecamatan Kuta Makmur	12.548	12.991	25.539	
1	Lhok Jok	453	410	863	
2	Saweuk	104	128	232	
3	Panton Rayeuk I	395	354	749	
V	Kecamatan Nisam Antara	6.909	7.126	14.035	
1	Alue Dua	2.492	2726	5.218	
Total		57.886	58.974	116.860	

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

2.2.6.2 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan Pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 2.54
Fasilitas Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kawasan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2020

No	Kecamatan/ Gampong	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	
I	Kecamatan Seunuddon	16	7	3	1	27
1	Bantayan	-	-	-	-	0
II	Kecamatan Samudera	13	5	2	-	20
1	Beuringen	-	1	1	-	2
2	Kuta Krueng	1	-	-	-	1
III	Kecamatan Syamtalira Bayu	10	3	1	1	15
1	Lancok	1	-	-	-	1
IV	Kecamatan Kuta Makmur	20	5	2	1	28
1	Lhok Jok	-	-	-	-	0
2	Saweuk	-	-	-	-	0
3	Panton Rayeuk I	1	-	-	-	1
V	Kecamatan Nisam Antara	12	3	1	-	16
1	Alue Dua	3	1	1	-	5
Total		71	23	9	3	106

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan yang didukung oleh fasilitas yang memadai dan pelayanan yang baik. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan perdesaan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dalah sebagai berikut :

Tabel 2.55
Fasilitas Kesehatan di Kawasan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2020

No	Kecamatan/ Gampong	Sarana Pelayanan Kesehatan				Jumlah
		Puskesmas	Pustu	Posyandu	Polindes	
I	Kecamatan Seunuddon	2	2	33	9	46
1	Bantayan	-	-	1	-	1
II	Kecamatan	1	5	40	23	69

No	Kecamatan/ Gampong	Sarana Pelayanan Kesehatan				Jumlah
		Puskesmas	Pustu	Posyandu	Polindes	
	Samudera					
1	Beuringen	-	-	1	1	2
2	Kuta Krueng	-	1	1	1	3
III	Kecamatan Syamtalira Bayu	-	2	42	-	44
1	Lancok	-	1	2	-	3
IV	Kecamatan Kuta Makmur	1	4	50	15	70
1	Lhok Jok	-	-	1	1	2
2	Saweuk	-	-	1	-	1
3	Panton Rayeuk I	-	-	2	1	3
V	Kecamatan Nisa Antara	1	3	15	2	21
1	Alue Dua	-	2	5	1	8
Total		5	16	180	49	250

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

Kawasan Pariwisata merupakan salah satu kawasan potensial yang sedang serius dikembangkan saat ini, yang bertujuan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan.

Seiring perkembangan kawasan pariwisata secara umum, konsep pariwisata syariah dewasa ini telah menjadi tren dalam pengembangan ekonomi yang berbasis pariwisata di beberapa tempat. Konsep ini meliputi adat istiadat dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam, gaya hidup. Definisi Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012).

Keberhasilan sektor pariwisata suatu daerah sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Merujuk pada penerapan konsep pariwisata syariah, keberadaan wisatawan terus meningkat.

Kawasan Pariwisata di Kabupaten Aceh Utara berada dalam 6 kecamatan dengan 9 gampong terpilih. Jumlah penduduk di Kawasan Pariwisata yang tercatat pada Tahun 2019 berjumlah

10.727 jiwa atau 7.88 % dari jumlah penduduk di 6 kecamatan tersebut yaitu 136.068 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dalam kawasan adalah Kecamatan Samudera yaitu 28.688 jiwa atau 21.08 % dari jumlah penduduk di kawasan Pariwisata, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah dalam kawasan adalah Kecamatan Nisam Antara yaitu 14.035 jiwa atau 10.31 % dari jumlah penduduk di kawasan Pariwisata.

Kawasan Wisata di Kabupaten Aceh Utara akan ditetapkan menjadi 3 (tiga) kawasan wisata, yaitu :

a. Kawasan Wisata Sejarah, dalam hal ini Kabupaten Aceh Utara dikenal dengan Kerajaan Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera yang merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Potensi wisata sejarah mencakup 3 (tiga) Gampong yaitu Gampong Beuringen dan Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera, Gampong Mesjid Pirak Kecamatan Matangkuli.

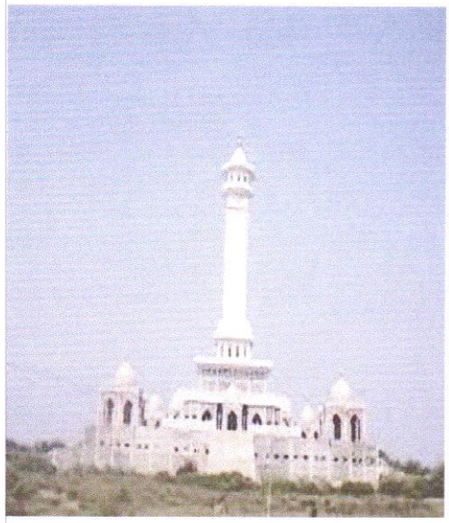

b. Kawasan Ekowisata, Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan par iwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutama kan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Potensi Ekowisata di Kabupaten Aceh Utara mencakup pada kegiatan Konservasi Penyu Belimbing di Gampong Bantayan Kecamatan Seunuddon, Penetapan Jalur Rempah mulai dari Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Samudera sampai ke Kecamatan Tanah Jambo



Aye serta dengan adanya Embrio Wisata Alam yang dikelola oleh Gampong seperti Objek Wisata Bantayan yang berada di Gampong Bantayan Kecamatan Seunuddon, Objek Wisata Lancok yang berada di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu, Objek Wisata Lhok Seulayang yang berada di Gampong Lhok Jok, Objek Wisata Krueng Saweuk di Gampong Saweuk dan Objek Wisata Krueng Meurayap dan Blang Kolam yang berada di Gampong Panton Rayoek I Kecamatan Kuta Makmur serta Objek Wisata Krueng Tuan dan Gunuk Salak yang berada di Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara.

c. Kawasan Wisata Sosial Budaya, Beragam situs peninggalan atau makam dan seni budaya, dalam bidang seni dan budaya, Kabupaten Aceh Utara memiliki 75 sanggar (group) kesenian pada tahun 2014 yang tersebar di 27 kecamatan. Group ini merupakan kelompok pelestari khasanah budaya dengan berbagai jenis kesenian. Untuk tarian, misalnya, seperti debus,



seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng, didong, prang sabilillah, dalael khairat, nadham, meurukon, dhike lingiek, Nasyid, drama bahasa aceh, nariet, poh kipah, pantoen, drumband, seni pahat, ukir, dan melukis. Disamping itu, terdapat pula sastra (pantun, syair, hikayat) dan seni lukis (kaligrafi). Budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan minimal sebesar 40% untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pargelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu objek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup suatu masyarakat. Oleh karena

itu lingkungan budaya serta kelestariannya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung. Nilai budaya dan kesenian di masyarakat sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan dilestarikan. Nilai-nilai sejarah yang diuraikan diatas menjadi andalan/*asset* pariwisata yang telah dikembangkan khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Selain nilai budaya peninggalan sejarah masyarakat di Kabupaten Aceh Utara masih mempertahankan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari cara hidup masyarakat. Berikut gambar peta Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Utara

Gambar 2.22

Peta Rencana Pembangunan Kawasan Kabupaten Aceh Utara

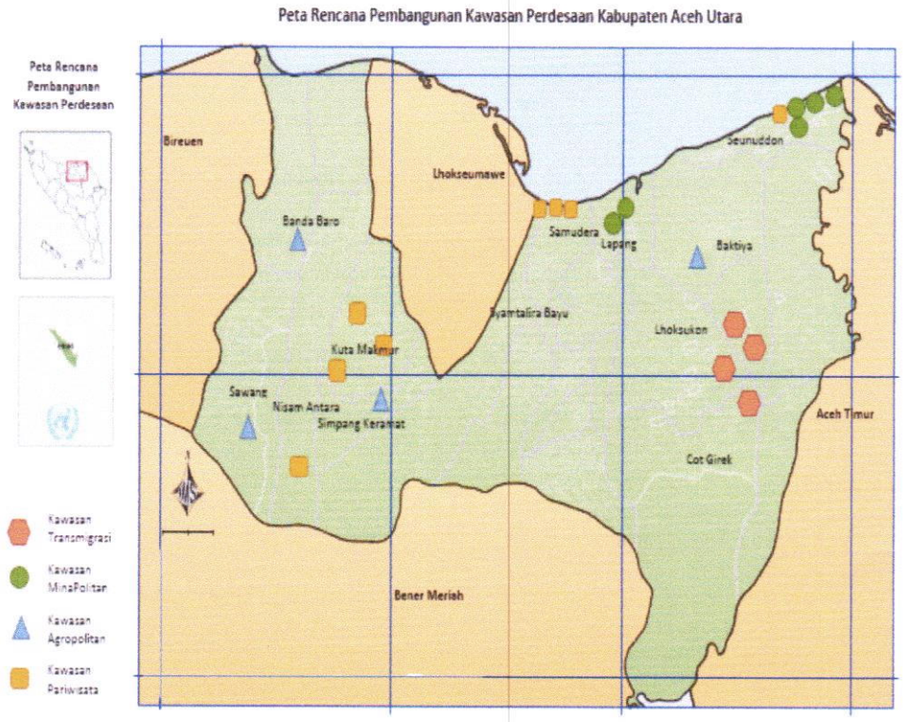

C. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu untuk:

a. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan;
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan;
c. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagai bahan masukan bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten untuk diusulkan kepada Bupati menjadi RPKP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
d. Meningkatkan pemahaman tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan tentang prosedur pemilihan dan penentuan kawasan perdesaan, rumusan program, kegiatan dan sumber dana, serta capaian yang di harapkan dari Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ini.

3.1.1 Kawasan Transmigrasi

Adapun tujuan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai berikut:

a. Membuka keterisolasian daerah perdesaan dalam kawasan transmigrasi
b. Pengembangan desa-desa dan mendorong swasembada pertanian dan perkebunan
c. Pengembangan Fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi.

3.1.2 Kawasan Minapolitan

Adapun tujuan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai berikut:

a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat kawasan perdesaan tentang Minapolitan
b. Mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan terhadap potensi hasil laut
c. Meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan
d. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran

3.1.3 Kawasan Agropolitan

Pembangunan kawasan Agropolitan adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing.

3.1.4 Kawasan Pariwisata

Tujuan Pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara pada dasarnya adalah menumbuh kembangkan kembali segala potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Utara untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2 Sasaran

3.2.1 Kawasan Transmigrasi

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan perdesaan dalam kawasan transmigrasi yaitu:

a. Membuka akses perdesaan dalam kawasan perdesaan transmigrasi
b. Mendorong Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan baru berbasis pertanian dan perkebunan;
c. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman kawasan transmigrasi

3.2.2 Kawasan Minapolitan

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan perdesaan dalam kawasan Minapolitan yaitu:

a. Meningkatnya Kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan potensi lokal dan permintaan dinamika pasar
b. Terwujudnya aktifitas tangkapan ikan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan
c. Menurunnya tingkat kemiskinan
d. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

3.2.3 Kawasan Agropolitan

Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan Agropolitan:

a. Meningkatkannya produksi dan produktivitas komoditi hasil pertanian serta produk-produk olahan yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang lebih efektif.
b. Penguatan kelembagaan petani.
c. Pengembangan kelembagaan agribisnis, seperti : penyediaan hasil pengolahan hasil distribusi pasar.
d. Pengembangan iklim yang kondusif bagi UMKM dan investasi

3.2.4 Kawasan Pariwisata

Sasaran pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara pada umumnya adalah memajukan kawasan pariwisata dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana destinasi pariwisata, secara lebih rinci sasarannya sebagai berikut:

a. Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara untuk tertarik datang menikmati keunggulan wisata di Kabupaten Aceh Utara.
b. Terciptanya merek dan produk khas serta objek tujuan wisata, sehingga terbangun sebuah pencitraan yang spesifik ketika wisatawan terpatri dalam pikiran tentang wisata Aceh Utara.
c. Tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yang meprioritaskan

objek Pariwisata melalui penciptaan produk wisata Islami berbasis budaya yang merupakan ciri khas daerah Kabupaten Aceh Utara.

d. Terkenalnya Wisata Budaya dan Peninggalan (*Culture* dan *Heritage*).
e. Tersedianya sarana-prasarana pendukung pelayanan aktivitas pariwisata yang memadai dengan kemudahan dan kenyamanan dalam aksebilitas.
f. Terealisasinya aktivitas pemasaran pariwisata terpadu dan focus pada wilayah serta segmen yang jelas sesuai dengan produk dan destinasi unggulan di Kabupaten Aceh Utara
g. Terwujudnya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) terutama di sekitas objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dan berkembangnya industi pariwisata di kalangan masyarakat.

3.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam Desain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat.

Strategi dan kebijakannya untuk periode tahun 2020-2024 terkait pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah. Strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satupun kelompok masyarakat (*leave no one behind*).

Fokus pembangunan adalah daerah di dekat pusat pertumbuhan yang dapat diberikan input untuk mengejar pertumbuhan di koridor pertumbuhan terdekatnya. Identifikasi

koridor pemerataan difokuskan pada daerah administratif yang dapat didorong secara cepat pertumbuhannya, dengan penyediaan infrastruktur dasar. Basis-basis pemerataan yang telah diidentifikasi utamanya adalah daerah tertinggal, daerah transmigrasi, kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dan kawasan perbatasan.

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dilaksanakan melalui Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata melalui kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi dalam konteks koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Strategi ini diharapkan menjadi lompatan perubahan sosial-ekonomi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan sesuai potensi daerah dan kearifan lokal. Untuk itu diperlukan beberapa strategi yaitu:

a. Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan pusat agribisnis yang berorientasi pada kekuatan pasar (market driven) diarahkan pada upaya peningkatan produksi komoditi pertanian dan perikanan unggulan serta pengembangan usaha agribisnis lain yang mendukung usaha agribisnis hulu, agri bisnis hilir (pemasaran, pengolahan hasil, sortasi dan grading) serta industri jasa dan pelayanan.
b. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan untuk peningkatan produksi dan pelayanan masyarakat.

c. Deregulasi bagi pengembangan usaha, pengembangan ekonomi daerah dan wilayah.

3.3.1 Kawasan Transmigrasi

Strategi Pengembangan Kawasan Transmigrasi daerah sebagaimana table berikut:

a. Peningkatan aksesbilitas dan koneksi kawasan transmigrasi
b. Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan baru berbasis pertanian dan perkebunan;
c. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman kawasan transmigrasi

Kebijakan Pengembangan Kawasan Transmigrasi daerah sebagaimana table berikut:

a. Meningkatkan akses jalan dan jembatan poros dan penghubung antar kawasan transmigrasi
b. Mendorong pengembangan transportasi antar pusat kawasan
c. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Pertanian dan perkebunan
d. Meningkatkan infrastruktur dasar lingkungan permukiman kawasan transmigrasi
e. Meningkatkan Penyediaan fasilitas umum dalam kawasan transmigrasi.

3.3.2 Kawasan Minapolitan

Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan:

a. Pengembangan jenis produk olahan hasil laut guna penambahan nilai produk pada Kawasan minapolitan
b. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan SDA wilayah pesisir
c. Pengembangan minapolitan berbasis lingkungan
d. Peningkatan kualitas perikanan tangkap
e. Pengembangan minapolitan berbasis lingkungan
f. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya

g. Peningkatan peran BUMG dalam pemberdayaan gampong melalui UMKM berbasis usaha perikanan dan kelautan

Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan:

a. Meningkatan kapasitas masyarakat pesisir tentang produk olahan hasil laut
b. Menciptakan pasar hasil produksi hasil laut
c. Meningkatkan *marketing, sustainability*, dan *participatory* (MSP)
d. Meningkatkan kapasitas nelayan tangkap
e. Membangun fasilitas vital untuk nelayan.
f. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan.

3.3.3 Kawasan Agropolitan

Strategi pembangunan Agropolitan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil pertanian
b. Peningkatan kapasitas sumber daya para petani
c. Peningkatan potensi sumber daya lokal hasil pertanian
d. Peningkatan infrastruktur publik

Adapun Kebijakan pembangunan Agropolitan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi disektor tersebut.
b. Mengembangkan standarisasi sumber daya manusia para petani maupun pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing di sektor pertanian.
c. Mengidentifikasi potensi yang ada diwilayah desa (gampong) untuk dapat dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pengembangan dan keberlanjutan kawasan tersebut.

3.3.4 Kawasan Pariwisata

Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata:

a. Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Srategis Pariwisata
b. Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Aceh Utara
c. Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru diberbagai kawasan wisata serta Memperkuat upaya Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan
d. Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata Untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten serta Memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan Lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata
e. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait dan Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi Potensi Kepariwisataan dan Lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata
f. Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata dan Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi Potensi Kepariwisataan dan Lingkungan dalam mendukung Revitalisasi Daya Tarik Kawasan di sekitarnya
g. Pengembangan dan peningkatan kemudahan, kenyamanan, keamanan, keterhubungan akses Darat dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Aceh Utara
h. Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan Pariwisata dan Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk Pengembangan fasilitas Pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta dan Merintis pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan Pariwisata

i. Skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Swasta serta Skema kemandirian pengelolaan
j. Mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwistaan dan Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata
k. Meningkatkan kapasitas/ skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang Pariwisata dan Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal
l. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisataan setempat dan Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya daerah.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata:

a. Menetapkan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK). Perwilayahan Destinasi Pariwisata
b. Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Aceh Utara
c. Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan daerah
d. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar
e. Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas
f. Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan dan Daya Saing Produk dan Kawasan Pariwisata Daerah

g. Pengembangan Sistem, Moda dan Sarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata
h. Pengembangan, peningkatan dan pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Aceh Utara
i. Peningkatan Kualitas Fasilitas Kepariwisataan yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Kawasan Pariwisata
j. Pengembangan dan Peningkatan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan
k. Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisataan
l. Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan terkait tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Transmigrasi, Agropolitan, Minapolitan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dapat diringkas sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1
Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan Transmigrasi, Agropolitan, Minapolitan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Kawasan Transmigrasi			
	Membuka keterisolasian daerah perdesaan dalam kawasan transmigrasi	Membuka akses perdesaan dalam kawasan perdesaan transmigrasi	Peningkatan aksesbilitas dan koneksi kawasan transmigrasi	Meningkatkan akses jalan dan jembatan poros dan penghubung antar kawasan transmigrasi
				Mendorong pengembangan transportasi antar pusat kawasan
	Pengembangan desa-desa dan mendorong swasembada pertanian dan perkebunan	Mendorong Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan baru berbasis pertanian dan perkebunan;	Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan baru berbasis pertanian dan perkebunan;	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Pertanian dan perkebunan
	Pengembangan Fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi	Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman kawasan transmigrasi	Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman kawasan transmigrasi	Meningkatkan infrastruktur dasar lingkungan permukiman kawasan transmigrasi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				Meningkatkan Penyediaan fasilitas umum dalam kawasan transmigrasi
2	Minapolitan			
	Meningkatkan pengetahuan masyarakat kawasan perdesaan tentang Minapolitan	Kawasan perdesaan terbangun sebagai pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan potensi lokal dan permintaan dinamika pasar	Pengembangan jenis produk olahan hasil laut guna penambahan nilai produk pada Kawasan minapolitan	Meningkatan kapasitas masyarakat pesisir tentang produk olahan hasil laut
	Mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan terhadap potensi hasil laut	Kerusakan lingkungan mampu diselesaikan tanpa mengganggu aktifitas laut	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan SDA wilayah pesisir	Menciptakan pasar hasil produksi hasil laut
	Meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan	Terwujud aktifitas tangkapan ikan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Pengembangan minapolitan berbasis lingkungan	Meningkatkan *marketing, sustainability*, dan *participatory* (MSP)
	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya tingkat kemiskinan	Peningkatkan kualitas perikanan tangkap	Meningkatkan kapasitas nelayan tangkap;
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Pengembangan minapolitan berbasis lingkungan	Membangun fasilitas vital untuk nelayan.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budiya	
			Meningkatnya peran BUMG dalam pemberdayaan gampong	
			Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	
3	Agropolitan			
-+	kawasan Agropolitan adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing	Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi hasil pertanian serta produk-produk olahan yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang lebih efektif.	Meningkatnya produksi dan pengelolaan hasil pertanian	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi disektor tersebut.
		Penguatan kelembagaan petani	Meningkatkan standar SDM para petani	Mengembangkan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				standarisasi sumber daya manusia para petani maupun pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing di sektor pertanian.
		Pengembangan kelembagaan agribisnis, seperti : penyediaan hasil pengolahan hasil distribusi pasar dll.	Pengembangan potensi sumber daya lokal	Mengidentifikasi poetensi yang ada diwilayah desa (gampong) untuk dapat dilakukan intervensi oeh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pengembangan dan keberlanjutan sektor tersebut.
		Pengembangan iklim yang kondusif bagi UMKM dan investasi		
4	Pariwisata			
	Tujuan Pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara pada	Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara untuk tertarik datang menikmati keunggulan	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunanKawasanPengembanganPariwisatadanKawasanSrateg	Menetapkan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	dasarnya adalah menumbuh kembangkan kembali segala potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Utara untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	wisata di Kabupaten Aceh Utara.	isPariwisata	Kabupaten (KPPK) dan KawasanStrategis Pariwisata Kabupaten (KSPK). Perwilayahan Destinasi Pariwisata
		Terciptanya merek dan produk khas serta objek tujuan wisata, sehingga terbangun sebuah pencitraan yang spesifik ketika wisatawan terpatri dalam pikiran tentang wisata Aceh Utara.	Penegakan Regulasi Pembangunan KawasanPengembangan Pariwisata (KPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Aceh Utara	Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Aceh Utara
		Tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yang meprioritaskan objek Pariwisata melalui penciptaan produk wisata Islami berbasis budaya yang merupakan ciri khas daerah	Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru diberbagai kawasan wisata serta Memperkuat upaya Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan	Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Kabupaten Aceh Utara.		
		Terkenalnya Wisata Budaya dan Peninggalan (Culture dan Heritage), sebagian besar peninggalan budaya di Kabupaten Aceh Utara merupakan objek wisata yang sangat potensial. Bahkan beberapa diantaranya sudah dikenal luas dikalangan wisatawan mancanegara. Objek wisata tersebut dalam bentuk peninggalan peradaban semasa puncak Kerajaan Islam Samudera Pasai, baik berbagai tempat bersejarah, bangunan, tarian, kerajinan dan jenis perayaan adat lainnya.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dankapasitasDayaTarikWisataUntukmendorongakselerasiperkembanganDestinasiPariwisataKabupaten serta Memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan Lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata	Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar
		Tersedianya sarana-prasarana pendukung pelayanan aktivitas pariwisata yang memadai dengan kemudahan dan kenyamanan dalam aksebilitas.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait dan Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi Potensi Kepariwisataan dan Lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Tarik Wisata	
		Terealisasinya aktivitas pemasaran pariwisata terpadu dan focus pada wilayah serta segmen yang jelas sesuai dengan produk dan destinasi unggulan di Kabupaten Aceh Utara	Revitalisasistruktur,elemendanaktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata dan Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi Potensi Kepariwisataan dan Lingkungan dalam mendukung Revitalisasi Daya Tarik Kawasan di sekitarnya	Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan dan Daya Saing Produk dan Kawasan Pariwisata Daerah
		Terwujudnya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) terutama di sekitas objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dan berkembangnya industi pariwisata di kalangan masyarakat.	Pengembangan dan peningkatan kemudahan, kenyamanan, keamanan, keterhubungan akses Darat dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Aceh Utara	Pengembangan Sistem, Moda dan Sarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata
			Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan Pariwisata dan Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk Pengembangan fasilitas Pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta dan Merintis pengembangan fasilitas umum	Pengembangan, peningkatan dan pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Aceh Utara

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan Pariwisata	
			Skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Swasta serta Skema kemandirian pengelolaan	Peningkatan Kualitas Fasilitas Kepariwisataan yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Kawasan Pariwisata
			Mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan KepariwistaandanMenguatkankelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata	Pengembangan dan Peningkatan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan
			Meningkatkankapasitas/ skill sertaproduklayananusahaekonomimasyarakatdibidang Pariwisata dan Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal	Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisataan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Meningkatkanpemahaman, dukungandanpartisipasi Masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisataan setempat dan Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya daerah	Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat

D.BAB IV INDIKASI PROGRAM DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan adalah segala macam upaya yang direncanakan untuk dilaksanakan agar dapat menanggulangi masalah yang ada sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada dikawasan perdesaan ataupun gampong. Perumusan Program Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk lima tahun kedepan merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan.

Perumusan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk lima tahun ke depan ini merupakan penjabaran yang bersifat lebih mendalam dan operasional dari program yang telah dirumuskan. Rencana kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Utara. Penyusunan Indikasi Program adalah untuk mengembangkan serta penanganan kawasan terkait akses, prasarana lingkungan, SDM dan sarana produksi yang dibutuhkan dalam aktivitas kawasan pedesaan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru.

Adapun rencana indikasi program dan pendanaan pada Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan masing–masing dapat dilihat sebagaimana matrik di bawah ini:

INDIKASI PROGRAM DAN PENDANAAN
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NO	PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Target										Sumber Dana	Imstansi Penanggung Jawab	Ket
			2020		2021		2022		2023		2024				
			Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)			
	Kawasan Transmigrasi														
1	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**														
	1. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Kemandirian														
	1. Sub Kegiatan Penguatan Sdm Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			-		25.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	40.000.000	APBK		
	1. Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman			-		270.000.000	2 Kawasan	100.000.000	2 Kawasan	120.000.000	2 Kawasan	100.000.000	APBK		
2	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**														
	1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	1. Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat Dan Transmigran			-		200.000.000	2 Kawasan	50.000.000	1 Kawasan	50.000.000	1 Kawasan	50.000.000	APBK		
3	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**														
	1. Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana												OTSUS		
	- ***UPT V LANGKAHAN GAMPONG BABUSSALAM, UPT VI BUKET HAGU GAMPONG CINTA MAKMUR, UPT II BUKET HAGU GAMPONG BUKET HAGU KECAMATAN LHOKSUKO dan UPT I ALUE LEUHOB***			2.776.400.000		4.327.495.000	4 Kawasan	2.579.493.000	4 Kawasan	32.246.752.000	4 Kawasan	20.550.000.000	APBA, APBN, OTSUS, MIGAS, APBK		
	Kawasan Minapolitan														
1	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**							1.110.000.000	-	1.360.000.000	-	1.360.000.000			
	1. KEGIATAN														
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan							1.110.000.000		1.360.000.000		1.360.000.000			
	SUB KEGIATAN														
	- Bimbingan dan Pelatihan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam Pesisir	Teupin Kuyun, Ule Reubek Barat, Ule Reubek Timu, Ulee Matang, Kuala Cangkoy, Matang Tunong					1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	APBG	DKP	
	- Penguatan kapasitas lembaga Lembaga dan kelompok nelayan	Teupin Kuyun, Ule Reubek Barat, Ule Reubek Timu,, Kuala Cangkoy					1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	APBK	DKP	
	- pembangunan dermaga dan bangunan yang memiliki fungsi	Teupin Kuyun					1 Paket	750.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	APBA	DKP	
2	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**							400.000.000	-	400.000.000	-	600.000.000			
	1. KEGIATAN														
	Pengelolaan Pembudidaya Ikan							400.000.000		400.000.000		600.000.000			
	SUB KEGIATAN														
	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Teupin Kuyun, Ule Reubek Barat, Ule Reubek Timu, Ulee Matang, Kuala Cangkoy, Matang Tunong					1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	300.000.000	APBK	DKP	

NO	PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Target										Sumber Dana	Imstansi Penanggung Jawab	Ket
			2020		2021		2022		2023		2024				
			.ne	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.,	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)			
	- Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Payau (Udang/ Bandeng/ Kepiting)	Teupin Kuyun, Ule Reubek Barat, Ule Reubek Timu, Ulee Matang, Kuala Cangkoy, Matang Tunong					1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	300.000.000	APBK	DKP	
3	**Program Ketahanan Pangan**							950.000.000		960.000.000		975.000.000			
	1. KEGIATAN														
	Pengaadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil							950.000.000		960.000.000		975.000.000			
	SUB KEGIATAN														
	- Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)	Teupin Kuyun, Ule Reubek Barat, Ule Reubek Timu, Ulee Matang, Kuala Cangkoy, Matang Tunong					1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	APBK	DKP	
	- Pembangunan / Rehab Saluran Irigasi Perikanan	Kec. Seunuddon, Kec. Lapang					1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	APBK	DKP	
	- Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat	Teupin Kuyun, Ulee Reubek Barat, Uee Reubek Timu					1 Unit	250.000.000	1 Unit	260.000.000	1 Unit	275.000.000	APBG	DKP	
4	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**							1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000			
	1. KEGIATAN			-		-									
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Skala Usaha Mikro dan							600.000.000		600.000.000		600.000.000			
	SUB KEGIATAN														
	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Seunuddon, Kec. Lapang					1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	APBK	DKP	
	- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ulee Matang, Teupin Kuyun, Ulee Reubek Barat					1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	APBK	DKP	

NO	PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Target										Sumber Dana	Imstansi Penanggung Jawab	Ket
			2020		2021		2022		2023		2024				
			Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)			
	2. KEGIATAN			-		-									
	Pembinaan Mutu Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha							650.000.000		650.000.000		650.000.000			
	SUB KEGIATAN														
	- Industri Rumah Tangga (Pengolahan Hasil Perikanan)	Teupin Kuyun, Ule Reubek Barat, Ule Reubek Timu, Ulee Matang, Kuala Cangkoy, Matang Tunong					6 UPI	500.000.000	6 UPI	500.000.000	6 UPI	500.000.000	APBK	DKP	
	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	APBG	DKP	
5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**							1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000			
	1. KEGIATAN														
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000			
	SUB KEGIATAN														
	- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (Jalan Lingkungan)	Teupin Kuyun, Ule Reubek Barat, Ule Reubek Timu, Ulee Matang, Kuala Cangkoy, Matang Tunong					6 Gampong	1.400.000.000	6 Gampong	1.400.000.000	6 Gampong	1.400.000.000	APBG	PRKP	
6	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**							8.000.000.000							
	1. KEGIATAN														
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah							8.000.000.000							
	SUB KEGIATAN														
	- Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kecc. Seunuddon					1 Unit	8.000.000.000					DOKA	PRKP	

NO	PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Target										Sumber Dana	Imstansi Penanggung Jawab	Ket
			2020		2021		2022		2023		2024				
			ne	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)			
7	**Program Penyelenggaraan Jalan**							23.575.000.000		40.025.000.000		63.510.000.000			
	1. KEGIATAN														
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							23.575.000.000		40.025.000.000		63.510.000.000			
	SUB KEGIATAN														
	- Pembangunan Jalan	Teupin Kuyun, Ule Reubek Barat, Ule Reubek Timu, Ulee Matang, Kuala Cangkoy, Matang Tunong					1 Paket	2.000.000.000	1 Paket	2.000.000.000	1 Paket	2.000.000.000	APBK	PUPR	
	Kawasan Pariwisata														
1	**Program Pemasaran Wisata**														
	1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	Aceh Utara	event	250.000.000										DISPORAPAR	
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				Kegiatan	50.000.000	Kegiatan	100.000.000	Kegiatan	150.000.000	Kegiatan	200.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata				event	150.000.000	event	250.000.000	event	270.000.000	event	300.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Rincian Objek seleksi pasangan agam dan inong Aceh Utara														
2	**Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata**														
	1. Kegiatan Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				dokumen	225.000.000	dokumen	500.000.000	dokumen	800.000.000	dokumen	1.000.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	Sub Kegiatan Perencanaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota														
	- Rincian Objek seleksi rancangan naskah akademik dan qanun pariwisata														
	- Rincian Objek perencanaan DED Blang Kolam Kecamatan Kuta Makmur														
3	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**														
	1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				lokasi	150.000.000	lokasi	180.000.000	lokasi	150.000.000	lokasi	150.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Rencana Induk Kepariwisataan				dokumen	350.000.000	dokumen	360.000.000	dokumen	400.000.000	dokumen	500.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				keg	50.000.000	keg	80.000.000	keg	100.000.000	keg	150.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				keg	150.000.000	keg	200.000.000	keg	250.000.000	keg	300.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	3. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
	- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		lokasi	50.000.000	Objek	50.000.000	lokasi	50.000.000	lokasi	80.000.000	lokasi	100.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Pengembangan Objek Wisata Unggulan		lokasi	50.000.000	Objek	50.000.000	lokasi	50.000.000	lokasi	100.000.000	lokasi	120.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Pembinaan SDM Bidang Pariwisata		orang	50.000.000	orang	50.000.000	orang	50.000.000	orang	150.000.000	orang	200.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Promosi Potensi dan Objek Pariwisata		Objek	50.000.000	Objek	50.000.000	Objek	50.000.000	Objek	100.000.000	Objek	120.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Perencanaan Daerah Tujuan Wisata				lokasi	100.000.000	lokasi	150.000.000	lokasi	200.000.000	lokasi	250.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Pemeliharaan Rutin/berskala Sarana dan Prasarana Pariwisata				Objek	100.000.000	Objek	120.000.000	Objek	150.000.000	Objek	180.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Pembersihan Bantaran Sungai Taman Wisata Bukit Salak		objek	150.000.000	objek	250.000.000	objek	500.000.000	objek	800.000.000	objek	1.000.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Pembebasan Lahan Taman Bukit Salak			-	lokasi	100.000.000	lokasi	150.000.000	lokasi	250.000.000	lokasi	500.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas Masyarakat pelaku usaha kepariwisataan (Dak Nonfisik)		keg	696.804.028	keg	750.000.000	keg	785.000.000	keg	885.000.000	keg	900.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Peningkatan Jalan Akses Kawasan Pariwisata				Paket	5.000.000.000	Paket	6.000.000.000	Paket	8.000.000.000	Paket	10.000.000.000	APBK	DISPORAPAR	
4	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**														
	1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar														
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			50.000.000	dokumen	50.000.000	dokumen	50.000.000	dokumen	100.000.000	dokumen	150.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Penyelenggaraan Dialog Kepariwisataan		peserta	50.000.000	peserta	100.000.000	peserta	75.000.000	peserta	150.000.000	peserta	200.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	- Pembinaan Kelompok Sadar Wisata		kelompok	50.000.000	kelompok	100.000.000	kelompok	75.000.000	kelompok	100.000.000	kelompok	150.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				peserta	120.000.000	peserta	500.000.000	peserta	800.000.000	peserta	1.000.000.000	APBK	DISPORAPAR	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					120.000.000		500.000.000		800.000.000		1.000.000.000			

NO	PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Target										Sumber Dana	Imstansi Penanggung Jawab	Ket
			2020		2021		2022		2023		2024				
			.ne	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.,	Volume	Pagu (Rp.)	Volume	Pagu (Rp.)			
	Kawasan Agropolitan														
1	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**					80.000.000		700.000.000		2.210.000.000		2.760.000.000			
	1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Aceh Utara				80.000.000		450.000.000		1.180.000.000		1.190.000.000			
	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman					80.000.000		450.000.000		1.180.000.000		1.190.000.000			
	- Pengembangan Nilam Gp. Riseh Tunong				2 ha	80.000.000	2 ha	80.000.000	3 ha	120.000.000	3 ha	120.000.000	APBK	Disbunnakkeswan	
	- Pengembangan Sere Wangi Gp. Riseh Tunong						1 ha	40.000.000	2 ha	80.000.000	2 ha	80.000.000	APBK	Disbunnakkeswan	
	- Pengembangan Kopi Gp. Riseh Tunong						6 ha	300.000.000	7 ha	350.000.000	7 ha	350.000.000	APBK	Disbunnakkeswan	
	- Penangkar dan pengembangan benih langsat Gp. Ie Tarek						3 ha	30.000.000	3 ha	30.000.000	4 ha	40.000.000	APBK	Distanpan	
	- Pengembangan benih langsat Gp. Ie Tarek								5 ha	100.000.000	5 ha	100.000.000	APBK	Distanpan	
	- Penangkar Benih Padi Gp. Alue Bili Rayeuk								50 ha	500.000.000	50 ha	500.000.000	APBK/ DOKA	Distanpan	
	2. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian									700.000.000		1.050.000.000			
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi									700.000.000		1.050.000.000			
	- Peningkatan Jalan Usaha Tani Gp. Riseh Tunong								2 km	700.000.000	3 km	1.050.000.000	APBK/ DOKA	Disbunnakkeswan	
	3. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain							250.000.000		330.000.000		520.000.000			
	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain							250.000.000		330.000.000		520.000.000			
	- Pengembangan dan penggemukan sapi Gp. Uleu Nyeu						20 ekor	160.000.000	30 ekor	240.000.000	50 ekor	400.000.000	APBK	Disbunnakkeswan	
	- Pengembangan ayam broiler (pedaging) Gp. Uleu Nyeu						3000 ekor	90.000.000	3000 ekor	90.000.000	4000 ekor	120.000.000	APBK	Disbunnakkeswan	
2.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air**							2.000.000.000		3.600.000.000		8.000.000.000			
	1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pasda Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1.000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota							2.000.000.000		3.600.000.000		8.000.000.000			
	Sub Kegiatan Rehabilitasi saluran irigasi permukaan							2.000.000.000		3.600.000.000		8.000.000.000			
	- Rehabilitasi jaringan sekunder Gp. Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya						1.000 m	2.000.000.000	2.800 m	3.600.000.000	4.000 m	8.000.000.000	APBK/ DOKA	Dinas PU dan Penataan Ruang	

Note : Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019

E. BAB V PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan untuk kawasan Transmigrasi, Agropolitan, Minapolitan dan Pariwisata di Kabupaten Aceh Utara bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pada kawasan yang ditetapkan. Prioritas pembangunan kawasan perdesaan pada pengembangan potensi atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Secara umum pengembangan Kawasan perdesaan dilakukan untuk menjembatani dan menggarisbawahi pembangunan kawasan perdesaan, yang mana desa sudah memiliki RPJM Desa sendiri dan kemudian harus melihat lingkungan antar desa, kemudian searah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Oleh karenanya dibutuhkan suatu desain yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan dalam percepatan pembangunan dan pengembangan Kawasan perdesaan.

Perlu dibentuk Tim di tingkat Kabupaten dalam pengelolaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Utara dalam 1 (satu) unit manajemen pengelolaan.

BUPATI ACEH UTARA,

Ir. MUHAMMAD THAIB